

Sektor LSM di Indonesia:
Konteks, Konsep dan Profil
Terkini
Megan McGlynn Scanlon dan
Tuti Alawiyah

Disusun untuk Department of Foreign Affairs
and Trade

Mengenai para penulis

Megan McGlynn Scanlon adalah Kepala Tim untuk proyek penelitian dan desain NSSC. Sebagai ketua, beliau mengawasi dan terlibat langsung dalam tiap tahapan desain, implementasi dan analisis penelitian. Ia juga merupakan peneliti utama untuk proyek sebelumnya, NGO Sector Review (STATT, 2012) serta penulis utama untuk laporan ulasan tersebut serta rekomendasi-rekomendasi yang membantu pembentukan desain penelitian NSSC. Sebelumnya, Megan bekerja dengan sejumlah LSM di Indonesia, Bolivia, Karibia Timur, dan Amerika Serikat. Gelar dual magister yang diperolehnya dari Columbia University berfokus pada manajemen lembaga non-profit dan desain program-program sosial. Megan dapat dihubungi di alamat email berikut: mmscanlon.consulting@gmail.com.

Tuti Alawiyah adalah Wakil Kepala Tim dan Analis Penelitian Kualitatif untuk desain NSSC. Sebelumnya, Tuti mengelola berbagai proyek riset, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat, termasuk proyek riset untuk Ford Foundation antara 2004–2007, yang meneliti peranan dan fungsi lembaga filantropi dan amal Islam di empat provinsi di Indonesia. Di Austin, Texas, dia juga melakukan penelitian hasil dan dampak dari organisasi nirlaba pada tahun 2012 dan menulis disertasinya mengenai modal sosial dan partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga akar rumput. Di antara tulisan yang dipublikasikan adalah *Social Capital: Promoting Health and Wellbeing among Indonesian Women* diterbitkan dalam *Affilia: Journal of Women and Social Work*. Tuti dapat dihubungi di alamat email berikut: talawiyah@gmail.com.

Rangkuman hasil penelitian internal ditulis oleh Rachael Diprose sebagai Penasihat Penelitian Senior dan laporan singkat dari hasil penelitian literatur ditulis oleh Ben Davis, yang adalah Peneliti Literatur Internasional, yang berkontribusi banyak dalam laporan ini. Masukan dari Sunili Govinnage, editor Seri Riset ini, juga memainkan peranan penting dalam penyusunan laporan singkat ini.

Disclaimer

Riset ini dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan pemerintah Australia, namun analisis dan temuan-temuan yang dijabarkan dalam laporan ini merupakan pendapat penulis dan tidak mencerminkan pandangan Pemerintah. Kesalahan-kesalahan dalam laporan ini adalah milik penulis.

Daftar Isi

1	Latar Belakang	1
2	Gambaran umum dan metodologi penelitian	2
2.1	Penelitian lapangan awal.....	3
2.2	Analisis jaringan.....	3
2.3	Ulasan program DFAT di Indonesia	4
2.4	Penelitian literatur	4
3	Konsep-konsep Kunci	4
3.1	Keberlanjutan.....	4
3.2	Lingkungan pendukung	5
3.3	Peranan individu	5
3.4	Keberagaman dalam sektor LSM	6
4	Sektor LSM Indonesia – gambaran umum.....	6
4.1	Sejarah dan konteks	7
4.2	Profil terkini	10
5	Temuan dan kesimpulan.....	12
6	Referensi.....	14
	Lampiran 1: Metodologi	16
	Lampiran 2: Ringkasan Hasil Temuan Penelitian	22

Daftar Singkatan

AU\$	Dolar Australia
DFAT	<i>Department of Foreign Affairs and Trade, Government of Australia</i> (Departemen Urusan Luar Negeri dan Perdagangan, Pemerintah Australia)
FGD	<i>Focus Group Discussion</i> (Diskusi kelompok terarah)
RP	Rupiah Indonesia
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat (<i>Non-Governmental Organisation</i>)
NSSC	<i>NGO Service and Study Centre</i> (Pusat Study dan Layanan LSM Nasional)
SNA	<i>Social Networks Analysis</i> (Analisis Jaringan Sosial)
AusAID	Australian Agency for International Development (tidak lagi beroperasi)
PDB	Produk Domestik Bruto / <i>Gross domestic product</i>
KKB / KBK	Koalisi Kebebasan Berserikat

Glossary

LSM	Lembaga swadaya masyarakat (<i>non-government organisations /NGO</i>) merupakan bagian dari masyarakat sipil, yaitu 'berbagai lembaga non-pemerintah dan non-pasar dimana kelompok masyarakat mengorganisir diri untuk mencapai kepentingan atau nilai-nilai bersama dalam kehidupan publik,' menurut Civil Society Engagement Framework milik DFAT. Organisasi masyarakat sipil merupakan suatu ruang dimana publik dapat memeriksa kuasa negara dan pasar dengan mengadvokasi untuk keadilan sosial dan ekonomi, dan untuk menjawab kebutuhan pembangunan sosial yang tidak dapat dilakukan oleh negara dan pasar. Keanggotaan dalam suatu organisasi masyarakat sipil bersifat sukarela dan tata kelola dilakukan sendiri, serta laba yang didapatkan dikembalikan ke dalam organisasi ketimbang dalam kantong anggotanya. Di bawah suatu kerangka kerja operasi, organisasi masyarakat sipil juga meliputi organisasi berbasis masyarakat, yang bekerja di tingkat lokal dan bergantung pada kontribusi dari para anggotanya untuk dapat beroperasi, seringkali untuk melayani para anggotanya. Sebagaimana halnya Laporan Ulasan Sektor LSM 2012 (<i>NGO Sector Review 2012</i>) (STATT, 2012), desain ini membedakan antara LSM dengan organisasi berbasis masyarakat, karena LSM memiliki struktur kelembagaan yang lebih kompleks, mengandalkan pada staf dibayar ataupun relawan, memiliki dasar keuangan yang kecil dan berfokus pada melayani sesama lewat pelayanan langsung, pengorganisasian masyarakat dan/atau advokasi, ketimbang melakukan kegiatan swadaya.
Sektor LSM	Sektor LSM menggambarkan kumpulan LSM yang beroperasi di ruang tertentu. Walaupun LSM yang berbeda melakukan kerja yang berbeda dan dengan komunitas yang berbeda pula, namun akan mengalami tren dan lingkungan kebijakan yang serupa, sehingga memiliki kepentingan dan tantangan bersama.
LSM nasional	LSM yang bekerja di dua atau lebih provinsi, atau mencakup lebih dari lima kabupaten di berbagai daerah di tanah air.
LSM lokal	LSM yang hanya bekerja di sebagian kabupaten atau satu kabupaten.

Abstrak

Laporan singkat ini merupakan yang pertama dalam seri tulisan yang menelaah penelitian awal yang dilakukan saat proses desain suatu fasilitas pendukung sektor LSM. Laporan ini memaparkan konteks serta kerangka kerja konseptual yang mendasari penelitian tersebut dan menarik beberapa tema kunci dari hasil temuan penelitian tersebut. Selain itu, laporan ini juga memperbarui penelitian yang ada mengenai sektor LSM yang dilakukan pada tahun 2010. Tulisan ini menjabarkan latar belakang sejarah munculnya sektor LSM di Indonesia serta menjelaskan profil terkini berdasarkan hasil temuan penelitian lapangan.

1 Latar Belakang

Dalam waktu 15 tahun belakangan, Indonesia telah mengalami sejumlah transisi kekuasaan demokratis, meningkatnya pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, serta tumbuh menjadi negara berpenghasilan menengah bawah. Dalam periode ini, sektor LSM di Indonesia berperan penting dalam mendorong reformasi politik, ekonomi dan sosial yang meliputi isu-isu seperti hak perempuan, anti-korupsi, kebebasan informasi dan toleransi beragama. Sektor LSM juga telah berkontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan. Namun kemampuan sektor LSM untuk meneruskan peranannya tersebut kini menjadi suatu persoalan yang kritis dengan menurunnya dukungan dana dari donor internasional yang dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi dan konsolidasi demokrasi dan reformasi di Indonesia.

Departemen Urusan Luar Negeri dan Perdagangan (*Department of Foreign Affairs and Trade /DFAT*) pemerintah Australia memulai suatu proyek untuk mendesain suatu Pusat Studi dan Pelayanan LSM (NSSC) pada akhir tahun 2014 dan awal tahun 2015. Fokus NSSC, sebagaimana dijelaskan dalam dokumen desain, adalah untuk mendukung sektor LSM di Indonesia mengatasi tantangan yang dihadapinya terkait menurunnya dukungan dana dari lembaga donor internasional. Suatu konsep kunci yang mendasari riset yang dilakukan saat proses desain adalah betapa pentingnya mendukung keberlanjutan lembaga secara individu maupun sektor LSM secara keseluruhan. Istilah 'sektor LSM' digunakan di sini untuk menggambarkan kumpulan LSM yang beroperasi di berbagai isu dan bidang. Walaupun LSM yang berbeda melakukan kerja yang berbeda dan dengan komunitas yang berbeda pula, namun memiliki tren umum dan lingkungan kebijakan yang serupa, sehingga memiliki kepentingan dan tantangan bersama.

Meskipun sektor LSM sangat penting, tidak ada bahan rujukan yang komprehensif yang dapat digunakan oleh tim desain NSSC ketika menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan sektor LSM Indonesia dan kemampuannya untuk meneruskan perannya di Indonesia. Laporan Ulasan Sektor LSM (*NSO Sector Review*) yang diluncurkan pada tahun 2012 mencakup suatu ulasan literatur yang luas serta mencatat kurangnya pengetahuan mengenai masyarakat sipil dan sektor LSM di Indonesia, khususnya terkait lingkungan pendukungnya.¹ Riset literatur yang dilakukan sebagai bagian dari proses desain NSSC menemukan hanya ada dua tulisan signifikan yang dihasilkan dalam hal analisis dan literatur mengenai topik ini.²

Laporan singkat ini merupakan bagian pendahuluan bagi Seri Riset NSSC, yang merupakan langkah awal untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan tersebut. Tujuan utama seri tulisan ini adalah untuk mengkompilasi dan mendiseminasikan temuan-temuan utama dari penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 dan awal tahun 2015. Diharapkan bahwa laporan-laporan singkat tersebut dapat berguna dan memberikan informasi bagi para individu dari LSM dan lembaga-lembaga donor, pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat umum yang ingin membantu pencapaian sektor LSM yang lebih kokoh di Indonesia. Meskipun bahan yang dipaparkan dalam seri riset ini didasarkan pada penelitian dan analisis yang ketat, hasil tulisan ini ditujukan bagi para praktisi dan pemangku utama yang memiliki kepentingan bersama untuk mendukung LSM dan memastikan keberlanjutan sektor ini di masa mendatang.³

Seri ini mencakup sejumlah laporan singkat yang menjabarkan tren dan praktik-praktik terkini terkait topik-topik di bawah dalam sektor LSM Indonesia, menjelaskan konteks dalam tren-tren internasional terkait topik-topik tersebut, serta memberikan sejumlah rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh berbagai pemangku kepentingan utama. Para kontributor dalam seri riset ini juga merupakan anggota tim penelitian dan desain NSSC awal yang melakukan pengumpulan data dan berbagai analisis data.

¹ STATT, 2012.

² Terkecuali *Civil Society Index* (Fitri et al., 2014) dan *Civil Society Sustainability Index* yang dilakukan oleh Konsil LSM pada bulan April 2015. (Hingga Agustus 2015 laporan tersebut belum diluncurkan untuk publik, namun direncanakan akan dikeluarkan pada akhir tahun 2015).

³ Laporan yang ditulis oleh Lassa dan Liu memberikan deskripsi analisis jaringan sosial LSM Indonesia (Laporan singkat no. 4), merupakan laporan yang sedikit lebih teknis dibandingkan dengan laporan oleh Davis mengenai diversifikasi pendanaan (Laporan singkat no. 2) dan laporan oleh Alawiyah mengenai manajemen sumber daya manusia dan kepemimpinan dalam sektor LSM (Laporan singkat no. 3). Namun, dalam tiap laporan, para penulis berupaya untuk memberikan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dipahami oleh pembaca non-akademik/non-teknis.

Selain itu, tim juga termasuk dua orang ahli di bidang analisis jaringan (network) dan editor yang khusus diminta untuk berkontribusi dalam seri tulisan ini.

Laporan singkat ini, yang juga merupakan tulisan pertama dalam seri ini, memberikan ikhtisar status dan profil sektor LSM Indonesia serta menelaah konsep-konsep kunci yang mendorong arah penelitian yang dilakukan saat proses desain NSSC dan yang muncul dari hasil temuan data. Laporan singkat dalam Seri Riset ini membahas:

- > Pendanaan dan upaya mengatasi tantangan penggalangan dana yang dihadapi oleh LSM Indonesia (Benjamin Davis).
- > Sumber daya manusia dan regenerasi kepemimpinan dalam sektor LSM (Tuti Alawiyah).
- > Jaringan antar LSM dan dengan pemerintah dan pihak swasta (Jonatan Lassa dan D. Elcid Liu).

Topik-topik tersebut selaras dengan berbagai topik yang diidentifikasi dari hasil penelitian dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan utama yang dilakukan saat proses desain. Ketiga topik di atas juga merupakan isu penting untuk mencapai suatu sektor LSM yang kokoh dan berkelanjutan, yakni suatu sektor yang:

- > memiliki hubungan kerja sama yang efektif dan setara dengan pihak pemerintah dan pihak swasta;
- > memiliki tata kelola yang baik, kemandirian dan akuntabilitas; serta
- > memiliki sumber pendanaan yang cukup dan beragam.

Hasil temuan penelitian lapangan dan konsultasi menunjukkan bahwa sektor LSM di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam tiap bidang di atas. Ketiga laporan singkat lainnya memberikan rekomendasi kepada berbagai pemangku kepentingan utama tentang bagaimana cara memitigasi tantangan-tantangan tersebut. Sebagai suatu pendahuluan bagi ketiga laporan lainnya, laporan singkat ini bertujuan untuk memberikan latar belakang dan konteks dalam seri riset ini, serta untuk memperbarui hasil temuan dari Laporan *NGO Sector Review 2012* (Ulasan Sektor LSM tahun 2012). Laporan ini tidak bermaksud untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut, tapi lebih memberikan gambaran kepada pembaca mengenai kerangka kerja konseptual yang membimbing arah penelitian. Laporan ini juga menggambarkan dan membahas konteks historik, sosial, politik dan ekonomi dimana LSM Indonesia beroperasi. Hasil temuan penelitian digunakan untuk menggambarkan profil dan tatanan LSM Indonesia terkini.

2 Gambaran umum dan metodologi penelitian

Proses desain NSSC dilaksanakan dengan suatu agenda penelitian yang cukup komprehensif.⁴ Penelitian ini memastikan bahwa desain NSSC didukung dan divalidasi oleh bukti terkait kebutuhan dan tujuan sektor LSM di Indonesia. Data dan hasil temuan dari penelitian ini menjadi masukan langsung bagi penulisan dokumen desain NSSC beserta lampirannya. Fase penelitian dan desain ini juga membuahkan hasil, temuan dan informasi yang relevan untuk dibagikan kepada pembaca yang lebih luas, yang merupakan tujuan seri riset ini.

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2014-2015 didasarkan pada proyek riset yang didukung oleh DFAT pada tahun 2012, yaitu *NGO Sector Review* (Laporan Ulasan Sektor LSM). Tujuan utama ulasan tersebut adalah untuk mengumpulkan informasi dan pengetahuan terkini mengenai LSM, sektor LSM dan hubungan dengan sektor-sektor lainnya guna mengidentifikasi bidang-bidang apa saja yang dapat didukung oleh DFAT (pada saat itu masih AusAID) serta yang dapat mendukung investasi terhadap tujuan pengurangan kemiskinan pemerintah Australia di Indonesia. Laporan *NGO Sector Review* ini terdiri dari ulasan literatur terstruktur, tinjauan media, penelitian lapangan di dua

⁴Ulasan metodologi dalam Lampiran 1 memberikan detail lebih lanjut mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian lapangan.

kabupaten di Indonesia, konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam sektor LSM maupun ahli LSM, serta suatu analisis dan pemetaan data kuantitatif. Juga terdapat analisis awal mengenai data keuangan proyek-proyek bantuan Australia di Indonesia.

NGO Sector Review ini membantu DFAT mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian lebih lanjut dan metodologi yang secara langsung membantu penelitian yang dilakukan pada tahun 2014-2015 untuk desain NSSC. Di samping pertanyaan-pertanyaan operasional dan strategis yang dibutuhkan untuk memberi masukan teknis pada desain, pertanyaan-pertanyaan konsep yang lebih luas dalam penelitian ini dibahas di Bagian 3 di bawah. Konsep utama yang mendorong penelitian ini dan yang menjadi dasar rangkaian rekomendasi yang terangkum dalam dokumen desain NSSC adalah keberlanjutan sektor LSM Indonesia. Tema ini tercermin dalam temuan-temuan penelitian mengenai menajemen sumber daya manusia dan kepemimpinan, diversifikasi pendanaan dan jaringan yang muncul dari proses pengumpulan data dan analisis. Pengumpulan data tersebut mencakup konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam dan di seputar sektor LSM. Meskipun tujuan konsultasi tersebut adalah untuk mengembangkan suatu dasar bukti bagi desain NSSC, penelitian tersebut menghasilkan data terkini dan unik bagi para pembaca luas, termasuk para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penelitian dan proses konsultasi.

Tiap kegiatan penelitian tahun 2014-2015 mengandung rangkaian pertanyaan dan metodologi masing-masing yang dijelaskan secara singkat di bawah ini dan secara mendetil dalam Lampiran 1. Penelitian metode campuran termasuk penelitian lapangan, analisis jaringan, ulasan data program DFAT dan penelitian literatur.

2.1 Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yang dilakukan untuk desain NSSC terdiri dari survei dan penelitian kualitatif. Survei kuantitatif yang digunakan merupakan survei mendalam yang terstruktur yang meliputi 105 LSM daerah di tujuh kota/kabupaten di empat provinsi, serta 42 LSM nasional/pendukung. Lokasi penelitian dipilih secara sistematis agar temuan yang muncul dapat digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai status sector LSM di Indonesia. Wawancara semi-terstruktur dan diskusi kelompok terarah (FGD) dilakukan di ketujuh kota/kabupaten dengan 214 orang dari pemerintah kota/kabupaten, pihak swasta dan LSM. Ada 361 orang total yang disurvei, diwawancarai, atau berpartisipasi dalam FGD. Berdasarkan hasil Laporan *NGO Sector Review 2012* dan pengetahuan anggota penelitian mengenai perkembangan sektor LSM terkini, penelitian lapangan mencakup beberapa tema berikut:

- > peranan dan fungsi LSM;
- > jaringan dan hubungan antar LSM;
- > hubungan LSM dengan pemerintah dan pihak swasta;
- > lingkungan pendukung, seperti kebijakan, pelayanan, kesetaraan gender dan inklusivitas yang mempengaruhi kemampuan LSM untuk memenuhi peranannya;
- > tingkat dan sumber pendanaan LSM;
- > akuntabilitas, struktur tata kelola dan rangkaian proses LSM; dan
- > sumber daya manusia, kepemimpinan yang efektif dan manajemen kelembagaan.

2.2 Analisis jaringan

Penelitian ini didasarkan pada data yang dikumpulkan lewat penelitian lapangan. Lassa dan Liu, yang merupakan spesialis Analisis Jaringan Sosial (*Social Network Analysis/SNA*) dan penulis laporan singkat terkait jaringan dalam seri ini, menganalisis data dari penelitian lapangan serta ulasan hubungan kerjasama DFAT dengan LSM menggunakan pendekatan SNA. Analisis jaringan melihat koneksi antara LSM di Indonesia di tingkat kelembagaan, menggunakan visualisasi yang dihasilkan menggunakan perangkat lunak analitik. Visualisasi tersebut memberikan wawasan mengenai struktur dan tingkat kestabilan jaringan yang dipelajari. Analisis ini juga mencakup menguji skenario dimana 'pusat-pusat' (*hub*) penting (yakni organisasi paling berpengaruh dalam jaringan) dikeluarkan dari

jaringan. Hal ini dilakukan dalam rangka melihat dampak yang terjadi jika jaringan runtuh, serta membahas langkah-langkah yang harus diambil untuk memitigasi masalah yang mungkin muncul.

2.3 Ulasan program DFAT di Indonesia

Ulasan hubungan kerja sama DFAT dengan LSM di Indonesia bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat menjawab empat pertanyaan kunci berikut:

1. Seberapa banyak pendanaan yang telah diberikan oleh DFAT kepada LSM Indonesia?
2. Apa saja jalur utama penyaluran dana kepada LSM Indonesia?
3. Bagaimanakah hubungan kerjasama dengan LSM Indonesia berkontribusi terhadap tujuan-tujuan pembangunan DFAT?
4. Bagaimana DFAT berencana untuk menguatkan LSM Indonesia dan apakah sudah berhasil?

Ulasan tersebut menganalisis hubungan kerjasama DFAT dengan LSM Indonesia dengan cara mempelajari dokumentasi program serta data primer yang dikumpulkan lewat wawancara, FGD dan survei kecil dengan LSM-LSM yang didanai oleh DFAT mengenai pengalaman mereka bekerja sama dengan lembaga donor asing secara umum.

2.4 Penelitian literatur

Selain itu, juga dilakukan penelitian literatur yang melihat literatur komparatif untuk menelaah tren-tren internasional dan pemikiran terkini mengenai masyarakat sipil dan LSM. Penelitian ini berfokus pada beberapa topik, termasuk peran LSM internasional, konsep keberlanjutan, serta kekuatan dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga penengah dan penyandang dana di Indonesia.

3 Konsep-konsep Kunci

Ada sejumlah konsep kunci yang penting untuk memahami analisis topik-topik dalam seri ini. Keberlanjutan sektor LSM Indonesia, sebagaimana digaribawahi di atas, merupakan suatu persoalan kunci yang muncul dari berbagai penelitian, konsultasi dan analisis. Suatu konsep yang juga sangat berhubungan dengan topik ini adalah 'lingkungan pendukung' dimana LSM beroperasi. Terakhir, dua isu lainnya yang penting untuk memahami sektor LSM Indonesia dan topik-topik dalam seri ini adalah peranan individu dalam sektor LSM dan keberagaman dalam sektor.

3.1 Keberlanjutan

Tiap topik yang diulas dalam seri ini terkait erat dengan dasar pemikiran penelitian ini, yaitu untuk mengidentifikasi cara-cara meningkatkan keberlanjutan sektor LSM Indonesia. Ada beberapa cara untuk memandang konsep keberlanjutan. Ada satu pendekatan yang melihat keberlanjutan hasil proyek, program atau upaya manapun dari suatu organisasi sebagai tujuan pembangunan secara umum.⁵ Asumsi kerangka kerja ini, yang juga membimbing arah penelitian untuk desain NSSC, adalah bahwa LSM '[t]idak seharusnya hadir bagi kepentingan mereka sendiri. ...[Mereka seharusnya] menambah nilai pada konteks dimana mereka bekerja'.⁶ Sektor LSM di Indonesia memang selama ini merupakan pendorong utama reformasi politik, ekonomi dan sosial, termasuk mengenai isu-isu seperti hak perempuan, anti-korupsi, kebebasan informasi dan toleransi keagamaan. Sektor LSM juga telah memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan.⁷

Cara lain untuk memandang keberlanjutan, yang juga merupakan fokus dari seri ini serta penelitian yang mendasarinya, adalah melihat keberlanjutan sebagai keberlanjutan LSM sebagai lembaga individu maupun sektor LSM yang terdiri dari kumpulan lembaga. Asumsi terkait keberlanjutan adalah

⁵ FHI 360, CAP, dan USAID, 2011.

⁶ PRIA, 2012

⁷ Dampak-dampak tersebut telah dicatat dalam laporan lainnya: lihat STATT, 2012.

bahwa untuk mencapai hasil yang baik dan berkelanjutan, dibutuhkan suatu upaya yang terorganisir dan hasil-hasil tersebut cenderung positif jika terlembaga dengan baik. Definisi keberlanjutan dari sudut pandang kelembagaan meliputi 'keberlanjutan kelembagaan' atau 'kapasitas yang tertanam dalam organisasi ketimbang dalam individu'.⁸ Keberlanjutan finansial, yakni definisi yang paling sering digunakan, hanya merupakan satu bagian kecil dari kerangka kerja yang lebih luas. Dengan menggunakan pendekatan fungsional tersebut, LSM yang berkelanjutan biasanya dianalisis berdasarkan beberapa unsur kelembagaan, termasuk pendanaan, manajemen dan tata kelola, nilai-nilai, misi, legitimasi dan kepemimpinan.⁹

3.2 Lingkungan pendukung

Konsep 'lingkungan pendukung' berkaitan dengan pertanyaan mengenai lingkungan pendukung sektor LSM. Suatu lingkungan pendukung meliputi LSM sebagai suatu lembaga; keuangan lembaga; peraturan dan perundang-undangan yang mempengaruhi LSM; dukungan dari pembuat kebijakan dan masyarakat umum; serta kemitraan dan jaringan yang kuat.¹⁰ Konsep ini melihat bahwa lembaga individu tidak beroperasi dalam suatu vakum, sama halnya dengan jaringan atau kumpulan organisasi. Faktor-faktor tingkat makro mempengaruhi bagaimana LSM dapat berfungsi dan hasil-hasil yang dapat dicapainya, baik sendiri maupun secara kolektif. Bagian 4 di bawah ini memaparkan gambaran umum mengenai lingkungan politik/kebijakan, sosial dan ekonomi dimana LSM Indonesia beroperasi di masa lampau hingga pertengahan tahun 2015.

Tiap laporan singkat dalam seri riset ini melihat semua aspek lingkungan pendukung dari sudut pandang yang berbeda dan saling melengkapi. Salah satu contoh termasuk bagaimana peraturan pemerintah mengenai insentif pajak untuk kegiatan filantropi (atau ketiadaan filantropi) dapat mempengaruhi ketersediaan jenis pendanaan alternatif, yang dapat membantu LSM mengurangi kebergantungannya pada sumber dana tradisional yang makin menurun dari lembaga donor internasional (sebagaimana dibahas oleh Davis dalam laporannya). Contoh-contoh lainnya termasuk bagaimana keterbatasan dana berarti bahwa LSM tidak dapat merekrut, membayar, melatih dan mempertahankan staf serta membentuk generasi kepemimpinan baru, atau bagaimana bekerja dalam budaya paternalistik berarti bahwa pengambilan keputusan dalam LSM hanya akan terpusat di kalangan staf senior (sebagaimana dibahas oleh Alawiyah dalam laporannya).

Dalam konteks global, Indonesia menduduki peringkat ke-59 dari 109 negara dalam hal lingkungan pendukung untuk masyarakat sipil, termasuk LSM.¹¹ Skor yang diraih oleh Indonesia adalah 0,52, yang dapat terbilang lebih rendah dari rata-rata global (0,58) dan lebih rendah dari negara-negara maju di kawasan Asia Pasifik, seperti Selandia Baru dan Korea Selatan. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia memiliki skor yang lebih tinggi daripada Thailand (0,50), Malaysia (0,44) dan Vietnam (0,37).¹² Walaupun dalam hal tata kelola ranking Indonesia berada di rentang nilai rata-rata, masih ada banyak tantangan terhadap penguatan sektor LSM Indonesia, termasuk isu pendanaan dan keberlanjutan¹³ serta lemahnya lembaga pendukung yang dapat memberikan dukungan kepada LSM lainnya. Terkait dimensi sosio-ekonomi, Indonesia menduduki ranking ke-78 dengan skor 0,43, di bawah rata-rata global, yakni 0,54. Namun, dalam hal dimensi sosio-budaya, Indonesia mendapatkan ranking yang tinggi, yaitu peringkat ke-15 dengan skor 0,62, lebih tinggi dari rata-rata global dengan skor 0,52.

3.3 Peranan individu

Bersamaan dengan lingkungan pendukung, peranan individu dalam lembaga dan dalam sektor LSM juga merupakan faktor yang penting untuk memahami cara berfungsi sektor LSM. Sebagaimana dijelaskan dalam laporan oleh Alawiyah dalam seri ini, faktor penggerak utama LSM Indonesia selama

⁸ Low dan Davenport, 2002.

⁹ Lihat contoh dari Okorley dan Nkrumah, 2012 dan Aldaba et al., 2000.

¹⁰ CIVICUS, 2013; PRIA, 2012

¹¹ Ashman, Carter, Goodin, dan Timberman, 2011.

¹² Lihat CIVICUS, 2013.

¹³ PRIA, 2012.

ini adalah aktivis individu dan relasi personal.¹⁴ Selain itu, hubungan perorangan dan jaringan pemayang sangat mempengaruhi hubungan-hubungan dalam sektor LSM maupun antara LSM, pemerintah dan pihak swasta. Masing-masing daerah memiliki sifat hubungan yang berbeda (lihat Bagian 3.4 di bawah). Contohnya, di Jawa Timur, LSM yang memiliki afiliasi dengan Nahdlatul Ulama¹⁵ dapat dengan mudah memperoleh kepercayaan pejabat pemerintah yang memiliki afiliasi yang sama untuk menjalankan program-programnya jika dibandingkan dengan LSM lainnya yang harus melewati sejumlah proses verifikasi yang rumit. Sebaliknya, hubungan LSM lingkungan hidup dengan pemerintah dan pihak swasta di Jambi tidak begitu rukun karena perbedaan pandangan dalam pengelolaan lingkungan. Namun demikian, hubungan personal cenderung dapat meredakan ketegangan dan mengarah pada kolaborasi. Ada beberapa contoh kolaborasi lintas lembaga di Jambi yang didorong oleh hubungan personal, seperti perumusan kontrak dengan pemerintah untuk melindungi lahan ribuan hektar ataupun mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk rekonstruksi daerah-daerah pemukiman yang terkena dampak eksploitasi sumber daya alam, termasuk bekerja sama dengan masyarakat adat.

3.4 Keberagaman dalam sektor LSM

Konsep terakhir yang dapat membantu untuk memahami isu-isu yang dibahas dalam seri ini adalah keberagaman dalam sektor LSM. Ada beberapa perbedaan penting dalam lingkungan serta tantangan yang dihadapi oleh LSM di tingkat kota/kabupaten dibandingkan yang berada di tingkat provinsi, lintas provinsi ataupun yang berskala nasional. Juga ada perbedaan dalam jenis tantangan yang dihadapi oleh lembaga yang menggunakan pendekatan pelayanan dibandingkan yang bergerak di bidang advokasi dan perubahan kebijakan, maupun perbedaan dalam hal lokasi geografis. Ada perbedaan nyata yang muncul dari analisis data lapangan ketika mengelompokkan dan melakukan perbandingan antara LSM berdasarkan akses dengan Jakarta dan ibukota provinsi. (Lihat Bagian 4.2 di bawah terkait perbandingan LSM yang bekerja di tingkat nasional dan lintas provinsi, di ibukota provinsi, di kota atau kabupaten yang dekat dengan ibukota provinsi, atau yang jauh dari ibukota provinsi.)

4 Sektor LSM Indonesia – gambaran umum

Bagian ini memaparkan gambaran umum terkait profil dan konteks sektor LSM Indonesia yang dapat membantu para pembaca seri ini memahami topik-topik kunci yang dibahas pada laporan lainnya. Serupa dengan laporan singkat lainnya, pembahasan dalam bagian ini menggunakan hasil penelitian lapangan yang dilakukan saat proses desain NSSC. Bagian ini juga merujuk pada Laporan *NGO Sector Review 2012*¹⁶, yang merupakan dasar untuk penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 dan 2015.

Patut dicatat bahwa LSM merupakan bagian dari masyarakat sipil, yaitu 'berbagai lembaga non-pemerintah dan non-swasta yang kian berkembang, dimana anggotanya berorganisir untuk mencapai kepentingan atau nilai-nilai bersama dalam kehidupan publiknya'.¹⁷ Organisasi masyarakat sipil merupakan suatu ruang dimana masyarakat publik dapat memeriksa kekuasaan negara dan pasar lewat upaya advokasi untuk keadilan sosial dan ekonomi, serta menjawab kebutuhan pembangunan sosial yang tidak dapat dilakukan oleh negara dan pasar. Keanggotaan dalam organisasi masyarakat sipil bersifat sukarela dan tata kelola dilakukan secara mandiri, dimana keuntungan/laba yang dihasilkan akan dikembalikan ke dalam lembaga ketimbang ke dalam kantong-kantong individu tertentu. Di bawah suatu kerangka kerja operasional, organisasi masyarakat sipil juga meliputi organisasi berbasis masyarakat, yang bekerja di tingkat lokal dan bergantung pada kontribusi dari para anggotanya untuk dapat beroperasi, seringkali untuk melayani para anggotanya. Sebagaimana halnya Laporan *NGO Sector Review 2012*, penelitian ini membedakan antara LSM dengan organisasi berbasis masyarakat, karena LSM memiliki struktur kelembagaan yang lebih kompleks,

¹⁴ Lihat STATT, 2012 untuk pembahasan mengenai hal ini; lihat juga Antlöv, Brinkerhoff, dan Rapp, 2010; Antlöv, Ibrahim, dan van Tuijl, 2006.

¹⁵ Merupakan lembaga Islam terbesar di Indonesia yang memiliki kehadiran cukup besar di Jawa Timur.

¹⁶ STATT, 2012.

¹⁷ AusAID, 2012.

mengandalkan pada staf dibayar ataupun relawan, memiliki dasar keuangan yang kecil dan berfokus pada melayani sesama lewat pelayanan langsung, pengorganisasian masyarakat dan/atau advokasi, ketimbang melakukan kegiatan swadaya.

4.1 Sejarah dan konteks

Sejarah LSM atau masyarakat sipil di Indonesia secara luas dapat ditelusuri kembali hingga jaman penjajahan. Masyarakat sipil terus memainkan peranan penting meskipun mengalami penekanan dalam hal ekspresi politik dan kerja-kerjanya, serta adanya undang-undang yang membatasi hak berkumpul yang diberlakukan pada jaman Orde Baru dari tahun 1965 hingga 1998.¹⁸ Pada pertengahan 1980-an, lembaga donor internasional dan LSM internasional menyalurkan sedikit dana dan dukungan bagi LSM Indonesia, yang didorong oleh meningkatnya peranan masyarakat sipil dalam transisi menuju demokrasi. Proses transisi menuju demokrasi yang terjadi pada akhir tahun 1990-an menyebabkan proliferasi dan perluasan LSM yang beragam. Proses desentralisasi yang mulai pada awal tahun 2000-an juga terus mendorong penyebaran tersebut. Desentralisasi menjadi pemicu berdirinya generasi LSM baru yang berfokus ada tata kelola dan layanan publik di daerah. Proses ini berujung pada dikeluarkannya UU no 6 tahun 2014 tentang Desa, yang dengan dukungan kepemimpinan masyarakat sipil membuahahkan anggaran pembangunan yang lebih tinggi bagi ribuan desa di Indonesia.¹⁹ Terlebih lagi, tersedia ruang bagi keterlibatan LSM dalam membantu desa-desa mengidentifikasi kebutuhannya dan dalam mengelola dan menggunakan dana tersebut dengan baik.²⁰

Dalam waktu 10 tahun belakangan, Indonesia merupakan bagian dari negara berpenghasilan menengah²¹ yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi sejak krisis keuangan pada tahun 1998.²² Antara tahun 2010–2015, tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) mencapai 5-6%.²³ Seiring dengan itu, kelas menengah di Indonesia juga tumbuh.²⁴ Keadaan ini membuka peluang namun juga menyebabkan tantangan bagi sektor LSM. Di tingkat global, seperti halnya di Indonesia, LSM mengalami beberapa pembatasan dana dari lembaga donor internasional, yang ingin melihat dananya dihubungkan dengan kebijakan luar negeri dan agenda perdagangannya (agar dapat menjustifikasi pengeluaran untuk bantuan asing saat pengeluaran domestik mengalami pemotongan anggaran). Selain itu, makin banyak donor yang berfokus pada program pelayanan ketimbang program untuk mendukung agenda LSM yang meliputi kerja-kerja perubahan sosial berjangka panjang.²⁵ Implikasi dari tren ini terhadap pandangan LSM Indonesia dibahas dalam laporan yang ditulis oleh Davis.

Saat ini, meskipun peranan sektor masyarakat sipil telah diakui secara luas dan dukungan sektor ini membantu terpilihnya Jokowi menjadi presiden RI, hubungan antara masyarakat sipil dengan pemerintah masih perlu terus dipantau. Ada banyak lembaga masyarakat sipil dan tenaga relawan yang terlibat membantu Presiden Joko Widodo dalam pemilihan umum tahun 2014.²⁶ Pemilu tersebut mencerminkan pergeseran yang cukup penting dari pemerintahan ‘Orde Baru’ menuju generasi pemimpin yang berasal dari luar struktur kekuasaan jaman tersebut. Ketika menjabat sebagai walikota Solo, Jokowi menjalin hubungan kerja sama yang erat dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil lokal, termasuk terkait isu-isu kelompok terpinggirkan secara sosial. Dalam masa jabatannya sebagai walikota maupun sebagai gubernur Jakarta, Jokowi secara tegas menyatakan dirinya anti-korupsi. Beliau juga berkonsultasi dengan para pemimpin LSM saat meluncurkan kampanye kepresidenannya serta saat periode transisi pra-inagurasi. Namun, ada banyak pihak di kalangan sektor LSM yang

¹⁸ Bahan dalam bagian ini diadaptasi dan diperbaruri dari STATT, 2012.

¹⁹ Parlina, I., dan Halim, H., 2013.

²⁰ Dukungan untuk Undang-undang Desa dimulai pada tahun 1999 ketika sejumlah jaringan LSM mengemukakan kekhawatirannya terkait isu-isu desa, keterpaparan masyarakat desa terhadap risiko lingkungan, dan hak-hak masyarakat adat (Pellini, Angelina, dan Purnawati, 2014)

²¹ Indonesia secara resmi tergolong sebagai negara berpenghasilan menengah bawah (yaitu negara dengan PDB per kapita di atas USD 1.005. Saat ini, PDB per kapita Indonesia adalah USD 3.514,60 (tahun 2014), lihat <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD>

²² Afif, n.d.

²³ Asian Development Bank, 2015.

²⁴ Salim, F, 2012. Indonesia’s Middle Class sebagaimana dikutip oleh Afif, n.d.

²⁵ CIVICUS, 2015.

²⁶ Suaedy, 2014. Hal ini juga dibahas dalam *Civil Society and the strengthening democracy*, Jakarta, November 25, 2014. Para presenter dalam sesi ke-dua (Ery Seda, Ivan Haddar, Olga Lydya, dan Nico Harjono) membahas ‘Perkembangan Situasi Politik, ekonomi, dan sosial budaya paska pemilu 2014 dan tantangannya bagi masyarakat sipil ke depan’.

merasa kecewa dengan Jokowi, yang hingga pertengahan tahun 2015 telah membuat beberapa keputusan yang sepertinya bertolak belakang dengan komitmen yang dibuatnya dalam kampanye anti-korupsi dan terkait isu-isu HAM.²⁷

Selain itu, dari sisi kelembagaan, ada sejumlah lembaga masyarakat sipil terkemuka yang merasa khawatir dengan pengeluaran UU no 17 tahun 2013 tentang Ormas.²⁸ Kekhawatiran tersebut muncul karena penggunaan kata-kata yang tidak jelas dalam beberapa pasal yang berpotensi untuk mengurangi tingkat kebebasan berkumpul dan berserikat. Muhammadiyah (lembaga keagamaan terbesar ke-dua di Indonesia) beserta Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB; yang terdiri dari 14 LSM nasional ternama) mengajukan permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi untuk menantang puluhan pasal dalam undang-undang tersebut. Pada bulan Desember 2014, Mahkamah menyetujui keberatan-keberatan yang diajukan oleh kedua lembaga tersebut dan memutuskan bahwa lebih dari 10 pasal dianggap tidak konstitusional, termasuk

- > peraturan mengenai pendaftaran di tingkat kabupaten;
- > peraturan mengenai tujuan pendirian suatu LSM;
- > peraturan mengenai mengenai badan pembina dan pelaksana; dan
- > peraturan mengenai keanggotaan.

KKB juga memohon agar pemerintah menghapuskan semua peraturan pemerintah yang dikeluarkan berdasarkan UU tersebut. Hingga pertengahan tahun 2015, dampak jangka panjang dari UU ini serta hasil keputusan Mahkamah Konstitusi masih belum jelas. Juga terdapat beberapa faktor kebijakan lainnya yang mempengaruhi kemampuan LSM untuk bekerja dan menggalang dana, yang ditelaah lebih lanjut dalam Laporan *NGO Sector Review 2012* dan laporan yang ditulis oleh Davis. Perlu dicatat bahwa sejak tahun 2012, KKB juga meminta agar draf UU Perkumpulan dijadikan prioritas untuk agenda legislatif nasional untuk periode 2015–2019. Jenis peraturan untuk perkumpulan yang ada kini (*Staatsblad* 1870 nomor 64) tidak sesuai dengan struktur lembaga yang kompleks di jaman modern sekarang jika dibandingkan dengan konteks saat peraturan itu dikeluarkan.²⁹

Sementara itu, dari hasil wawancara dari FGD yang dilakukan saat desain NSSC, baik pemerintah maupun pihak swasta menyatakan pandangan dan penghargaan yang positif terhadap peranan LSM dalam kerja-kerja advokasi maupun pelayanan sosialnya. Namun, sikap publik terhadap LSM secara historis tidak selalu positif karena kurangnya pemahaman tentang peran LSM dalam masyarakat, maupun kecenderungan sektor LSM berfungsi sebagai ‘demokrat terapung’ (*floating democrats*).³⁰ Meskipun demikian, tingkat kepercayaan terhadap LSM menunjukkan peningkatan. Satu survei menunjukkan peningkatan sebesar 22% dalam hal kepercayaan publik terhadap LSM antara tahun 2013 dan 2014, dimana dilaporkan ada 73% masyarakat menyatakan kepercayaannya pada LSM.³¹

²⁷ Mietzner dan East-West Center, 2015.

²⁸ Undang-undang ini merupakan amandemen UU Ormas no 8 tahun 1985. Menyesuaikan dengan STATT (2012), istilah organisasi masyarakat diterjemahkan menjadi *community organisations*, ketimbang *mass organisations*. Pada Desember 2012, draf UU ini merujuk pada organisasi masyarakat, yang diterjemahkan menjadi *community organisations* ('Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Organisasi Masyarakat,' 2011). Selain itu, UU ini bermaksud untuk mencakup semua organisasi non-pemerintah, non-komersil, sehingga makna 'ormas' dalam teks di atas dipandang lebih luas dari organisasi berbasis massa.

²⁹ Lihat Diskusi Inisiasi Advokasi RUU Perkumpulan, 2011; dan 'Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum,' 1870.

³⁰ Törnquist et al. 2003 dan Manning dan Van Dierman 2000, sebagaimana dikutip dalam Antlov, Brinkerhoff, dan Rapp, 2008; Edelman, 2014; Ibrahim, 2006.

³¹ Para penulis temuan survei 'berasumsi' bahwa peningkatan ini terjadi karena adanya transparansi dan pelaporan yang lebih baik (Edelman, 2014: 39); kemitraan berprofil tinggi dengan perusahaan (yang menurut survei yang sama, telah terbiasa mencapai tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat Indonesia); dan bahwa 'banyak warga Indonesia melihat LSM sebagai bagian penting dalam mengembangkan masyarakat sipil.' Sebagian besar pemikir dan ahli sektor LSM Indonesia tidak memiliki pandangan yang sama mengenai hal ini. Tidak ada cukup bukti yang menghubungkan antara faktor-faktor tersebut dengan perubahan dalam angka tersebut. Juga ada kesenjangan antara tingkat kepercayaan pada tahun 2014 dalam laporan pada tahun 2014 dengan update tahun berikutnya, yang menyatakan bahwa kepercayaan berada di 64% untuk LSM pada tahun 2014, ketimbang 73% (Edelman, 2015).

Perspsi mengenai transparansi mempengaruhi tingkat kepercayaan LSM oleh pelaku lainnya dalam konteks Indonesia.³² Dalam penelitian kualitatif yang dilakukan untuk desain NSSC, ada beberapa responden dari pemerintah dan pihak swasta yang menyatakan kecurigaan atau ketidakpercayaannya, meskipun mengingat sejarah antara ketiga sektor ini, jumlahnya lebih kecil daripada dugaan semula. Secara lebih luas, dan lebih penting, para responden menyatakan bahwa tidak cukup banyak informasi mengenai kerja-kerja LSM. Ada pandangan di kalangan responden pemerintah dan pihak swasta bahwa LSM tidak memiliki sistem manajemen kinerja dan keuangan yang kuat, dan mereka juga menyatakan bahwa tidak ada sistem akreditasi atau sertifikasi yang dapat memberikan informasi tentang kinerja dan dokumentasi kemajuan dan hasil-hasil program.

Jika melihat beberapa indikator yang beragam, akuntabilitas LSM kepada penerima manfaat dan publik memang belum begitu baik menurut survei LSM yang dilakukan saat proses desain NSSC. Hampir semua LSM lokal dan nasional melaporkan bahwa mereka memiliki suatu mekanisme atau cara mengumpulkan informasi tentang kemajuan dan hasil-hasil program, namun hanya sepertiga LSM lokal dan kurang dari setengah LSM nasional menggunakan informasi tersebut untuk mendukung kerja-kerja advokasi dan kurang dari dua pertiga menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan organisasi dan mengembangkan perencanaan program tahunan. Staf LSM juga menyatakan bahwa salah satu kelemahan organisasi mereka adalah tidak memiliki ukuran yang jelas untuk mengevaluasi tingkat kemajuan dan dampak kerja. LSM nasional lebih sering membagikan laporan keuangan dan hasil program kepada publik daripada organisasi di tingkat daerah. Di antara LSM yang melakukan audit, LSM nasional menyatakan bahwa audit lebih dilakukan untuk kepentingan internal daripada untuk donor ketimbang sejumlah kecil LSM daerah yang melakukan audit. LSM di tingkat daerah cenderung melakukan audit karena diharuskan oleh donor.³³

Status berbadan hukum tidak dapat digunakan sebagai indikator akuntabilitas dalam konteks Indonesia. Menurut Laporan *NGO Sector Review*, sistem pendaftaran diri jarang ditegakkan dan berdampak kecil terhadap operasi organisasi (meskipun laporan belakangan tentang UU Ormas ada yang digunakan untuk membatasi kemampuan LSM yang memberi tekanan terhadap pemerintah atau melakukan kegiatan bersama pemerintah). Menurut survei yang dilakukan pada tahun 2009 dan survei lapangan yang dilakukan untuk Laporan *NGO Sector Review 2012*, meskipun sebagian besar LSM 'mendaftarkan diri dengan notaris umum, ada banyak lembaga yang tidak menyelesaikan proses pendaftaran diri dengan badan-badan pemerintah terkait'.³⁴ Berdasarkan hasil data survei NSSC, untuk LSM lokal, makin dekat lembaga itu dengan pusat perkotaan, makin besar kemungkinan LSM itu berbadan hukum, dan LSM nasional dua kali lipat lebih besar kemungkinan berbadan hukum dibandingkan dengan LSM kota/kabupaten. Pengalaman lapangan oleh tim penelitian NSSC dan perhitungan yang dilakukan saat melakukan Ulasan Sektor LSM menunjukkan bahwa daftar resmi dari pemerintah, jika dapat diperoleh, cenderung tidak terlalu bermanfaat dalam mengidentifikasi LSM yang beroperasi di tingkat kota atau kabupaten.³⁵ Meskipun daftar tersebut menunjukkan ada banyak LSM yang menjalankan program dan upaya advokasi yang aktif, sebagian besar lembaga yang telah menyelesaikan proses pendaftaran diri di berbagai tempat dan masuk dalam daftar resmi nampaknya merupakan lembaga plat merah, yang kemungkinan diciptakan oleh politisi atau untuk mengakses kontrak proyek dari pemerintah.³⁶

³² Transparansi merupakan hal yang penting untuk tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia dalam suatu lembaga, menurut suatu studi global mengenai kepercayaan (Edelman, 2014).

³³ Audit bukan merupakan cara yang ideal untuk mengukur transparansi atau akuntabilitas, karena biaya yang mahal dan juga hasilnya cenderung tidak tepat untuk organisasi yang memiliki anggaran yang kecil. Namun, indikator yang tepat untuk merepresentasikan definisi akuntabilitas sangat sulit didapatkan.

³⁴ Survei pada tahun 2009 yang dikutip dalam STATT, 2012 merujuk pada Artonang, Yusran, Taufik, dan Promedia, 2009.

³⁵ Kalkulasi dari STATT, 2012 menunjukkan bahwa 20% dari daftar resmi dari daerah tertentu menunjukkan organisasi-organisasi yang aktif (hal. 20).

³⁶ Fenomena mengenai organisasi 'plat merah' yang merujuk pada warna plat mobil milik pemerintah telah terdokumentasi dengan baik (lihat contohnya Ibrahim, 2006, Ibrahim, et al., 2009, McCarthy dan Kirana, 2006).

4.2 Profil terkini

Berdasarkan latar belakang di atas, tercatat sekitar 2.293 LSM yang aktif di Indonesia pada tahun 2012.³⁷ Hampir di semua daerah di Indonesia terdapat LSM. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa sumber daya dan kapasitas LSM sangat bervariasi, yang dapat dikategorikan berdasarkan variabel berikut:

- > LSM kota/kabupaten, provinsi dan nasional³⁸;
- > LSM kecil, menengah atau besar; atau
- > cabang LSM yang lebih besar atau koalisi jaringan LSM, atau organisasi mandiri.

Lokasi juga merupakan karakteristik kunci lainnya. Penelitian lapangan melihat LSM kota/kabupaten yang terletak di dekat ibukota provinsi maupun yang jauh dari ibukota provinsi. Data menunjukkan bahwa rangkaian karakteristik di atas mempengaruhi berbagai aspek lembaga, seperti sumber daya, kemampuan dan kapasitas untuk merespons berbagai tantangan yang ada.

Terkait isu pemasukan keuangan, Laporan *NGO Sector Review* mencatat:

*Meskipun hubungan antara jumlah penduduk daerah dengan jumlah LSM yang ada tidak signifikan secara statistik, ada korelasi positif yang kuat antara PDB suatu daerah dengan jumlah LSM (yaitu makin tinggi PDB, makin banyak jumlah LSM). Temuan ini dan temuan serupa dari Banglades pada tahun 2005 menunjukkan bahwa LSM dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan.*³⁹

Diperkirakan bahwa sektor LSM di Indonesia secara keseluruhan memiliki pendapatan sebesar AU\$340 juta (Rp 3.4 triliun) pada tahun 2013.⁴⁰ Seperti akan dijelaskan secara lebih mendetil dalam laporan singkat yang ditulis oleh Davis, jumlah pemasukan tersebut hanya terkonsentrasi pada sekelompok kecil lembaga. Kuartil LSM nasional terkaya menghasilkan Rp 15,5 milyar pada tahun 2013, sedangkan untuk kuartil LSM termiskin di daerah, termasuk di tingkat provinsi, hanya menghasilkan kurang dari Rp 1,8 juta. Sumber dana utama bagi LSM nasional adalah dari donor atau LSM internasional (73%). Selain itu, ada sekitar 7% LSM tambahan yang melaporkan bahwa sumber pendanaan utama mereka adalah LSM nasional, yang secara praktis berarti bahwa pendanaan hampir dipastikan berasal dari lembaga donor internasional, meskipun tidak secara langsung. Persentase ini serupa dengan LSM provinsi, dimana LSM kota/kabupaten bergantung pada dana swadaya dengan 60% lembaga melaporkan bahwa swadaya merupakan sumber dana utamanya dan beberapa dari 14% yang melaporkan 'sumber lainnya' melakukan penggalangan dana berbentuk 'swadaya'.⁴¹

Perbedaan antara LSM nasional, provinsi, dan kota/kabupaten juga terlihat dari staf dan sumber daya manusia, yang dibahas secara mendetil dalam laporan yang ditulis oleh Alawiyah. Organisasi nasional lebih mungkin memiliki staf (dibayar dan tidak dibayar) dan juga memiliki jenis staf yang lebih banyak. Berbeda dengan organisasi di tingkat daerah, semua LSM nasional yang disurvei memiliki setidaknya satu staf penuh waktu. LSM kota/kabupaten yang berlokasi jauh dari ibukota provinsi lebih besar kemungkinan memiliki staf paruh waktu tidak dibayar dibandingkan dengan yang berlokasi di tempat lain serta cenderung hanya memiliki satu atau sejumlah kecil anggota staf.

³⁷ Menurut *NGO Sector Review*, 'Kalkulasi ini didasarkan pada 11.468 LSM yang terdaftar oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2010, dan merupakan estimasi yang didasarkan pada penelitian lapangan untuk *Review* dimana 20% dari lembaga yang ada di daftar pemerintah merupakan organisasi yang betul-betul aktif' (STATT, 2012, hal. 24).

³⁸ LSM kota/kabupaten merupakan LSM yang berfokus dalam satu atau dua kota/kabupaten (jika kabupaten tersebut mengalami pemekaran); LSM provinsi bekerja di dua atau lebih kota atau kabupaten dalam suatu provinsi; LSM nasional bekerja di beberapa provinsi atau di tingkat nasional, kebanyakan bekerja untuk memberi dukungan pada sektor LSM secara keseluruhan.

³⁹ STATT, 2012 hal. 25.

⁴⁰ Berdasarkan pemasukan rata-rata yang dilaporkan untuk lokali penelitian di tujuh kota/kabupaten, dikali jumlah kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, ditambah rata-rata pemasukan yang dilaporkan oleh LSM nasional yang disurvei, dikali dengan estimasi jumlah LSM nasional.

⁴¹ Termasuk sumber-sumber dari zakat, unit usaha dan iuran anggota.

Laporan *NGO Sector Review* mencatat kecenderungan LSM Indonesia (seperti halnya LSM di konteks negara berkembang lainnya) menjadi lembaga generalis, yakni 'menggunakan pendekatan sebagai pemberi layanan masyarakat atau mengorganisir masyarakat untuk pemberdayaan diri atau kelompok ketimbang berfokus pada perubahan tingkat makro yang sistematis di bidang atau sektor tertentu'.⁴² Data dari tahun 2014 juga menambah nuansa dari karakteristik ini: Ada perbedaan signifikan antara kerja-kerja LSM daerah dan nasional. LSM nasional cenderung melakukan riset atau advokasi kebijakan, sedangkan LSM daerah cenderung bergerak di bidang pelayanan sosial. LSM nasional juga cenderung memberikan pelatihan bagi LSM lainnya dibandingkan dengan LSM provinsi atau kota/kabupaten. Ada banyak LSM nasional, provinsi dan kota/kabupaten yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, hukum dan HAM, serta pendidikan. Namun LSM kota/kabupaten cenderung berfokus pada bidang pertanian, lingkungan pengembangan ekonomi dan kesehatan.⁴³

Hingga batas tertentu, perbedaan-perbedaan ini tidak mengejutkan, dimana LSM yang lebih kecil dan berfokus pada masyarakat cenderung menyalurkan layanan langsung. Perbedaan-perbedaan ini juga timbul dalam suatu konteks dimana 'bagian tengah (organisasi pendukung LSM) yang hilang' dalam sektor LSM Indonesia, dimana LSM nasional tidak memiliki hubungan yang kuat dengan lembaga-lembaga kecil yang bekerja lebih dekat dengan komunitas, dimana hal ini juga sebetulnya menjadi perhatian dari LSM nasional yang bertujuan melayani komunitas.⁴⁴ Hal ini merupakan fenomena yang terus muncul dalam konteks LSM Indonesia, dan bahkan dengan terbukanya ruang untuk berkumpul sejak jatuhnya pemerintahan Suharto pada tahun 1998, belum mengalami banyak perubahan. Laporan singkat yang ditulis oleh Lassa dan Liu tentang jaringan dan laporan yang ditulis oleh Davis mengenai diversifikasi pendanaan akan membahas sedikit mengenai fenomena 'bagian tengah yang hilang' tersebut. Sektor LSM Indonesia juga memiliki infrastruktur pendukung menengah yang relatif lemah; dengan kata lain tidak ada dukungan yang cukup dari lembaga-lembaga yang dapat memberikan pembangunan kapasitas dan dukungan strategis bagi LSM-LSM kecil dan lokal.⁴⁵ Hal ini juga merupakan cerminan tren global. Kelebihan dari adanya suatu infrastruktur lembaga pendukung dalam sektor LSM berkaitan erat dengan evolusi masyarakat sipil terkait. Sektor LSM yang masih dalam proses menjadi 'dewasa' cenderung memiliki lembaga pendukung LSM yang sedikit. Selain itu, negara-negara yang memiliki latar belakang demokrasi yang kuat, seperti Filipina, Brasil dan Peru memiliki lembaga-lembaga pendukung LSM yang lebih kuat dibandingkan dengan negara-negara yang tidak memiliki latar belakang demokrasi yang kuat.⁴⁶

Meskipun ada banyak LSM nasional yang disurvei yang melaporkan bahwa mereka membantu memberikan pelayanan bagi LSM daerah, kurang dari dua pertiga lembaga berinteraksi dengan koalisi LSM dan LSM nasional. Akses kepada ibukota provinsi sangat penting dalam hal ini; LSM yang berlokasi jauh dari ibukota provinsi kemungkinan kecil berinteraksi dengan LSM nasional dibandingkan dengan yang berada di dekat ibukota (kurang dari setengah LSM yang jauh dari ibukota pernah berinteraksi dengan LSM nasional, dibandingkan dengan hampir dua pertiga LSM yang berlokasi di dekat ibukota). Sekitar 60% LSM kota/kabupaten pernah berinteraksi dengan koalisi/jaringan atau LSM nasional, namun hanya rata-rata sekali dalam satu tahun (berbeda dengan LSM nasional, 90% terlibat dalam suatu koalisi atau jaringan dan saling berinteraksi rata-rata dua sampai tiga kali dalam satu tahun). Terlebih lagi, mayoritas LSM nasional mengidentifikasi lembaga mitranya lewat lembaga dan hubungan pribadi atau secara lisan. Pentingnya organisasi berbasis keanggotaan dengan cabang lokal dalam konteks Indonesia tidak mampu mencegah isolasi ini; makin jauh suatu kabupaten dari pusat kota, makin kecil kemungkinan lembaga itu merupakan cabang dari lembaga yang lebih besar (berserta akses yang didapatkan). Bagaimanapun, lembaga cabang

⁴² STATT, 2012, hal. 25.

⁴³ Meskipun kesehatan tidak terlalu tercermin dari data survei NSSC mengenai LSM daerah, hasil ini dipengaruhi oleh lokasi survei. Merujuk pada hasil STATT (2012) dari penelitian lapangan sebelumnya di NTT dan di daerah lain dimana kesehatan cenderung mendapatkan perhatian lebih besar.

⁴⁴ Lihat Clark, nd; McCarthy dan Kirana, 2006:13, dikutip dalam STATT, 2012. Fenomena ini juga dapat ditemukan di tempat lainnya sebagaimana dikutip dalam PRIA, 2012.

⁴⁵ Organisasi-organisasi pendukung menengah ini juga seringkali disebut 'Organisasi Sumber Daya Masyarakat Sipil' (*Civil Society Resource Organisations*): "Dimiliki, dikelola, dan dioperasikan secara lokal; bersifat swasta dan non-pemerintah; mandiri dan non-profit, memiliki misi yang berkontribusi terhadap partisipasi dalam masyarakat sipil untuk mengatasi isu-isu pembangunan; serta memobilisasi sumber daya dari dalam atau luar negeri dan meneruskannya kepada kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya lewat hibah atau mekanisme pendanaan lainnya (Winder, 1998; The Synergos Institute, 2002). Untuk informasi lebih lanjut mengenai Organisasi Pendukung Menengah, lihat Ashman, Carter, Goodin, dan Timberman (2011).

⁴⁶ Ashman, Carter, Goodin, dan Timberman, 2011.

mungkin mendapatkan dukungan, namun tidak menjamin adanya interaksi dan komunikasi dengan jaringan yang lebih luas secara regular.

Interaksi LSM dengan pemangku utama lainnya juga cenderung tidak sering dan bersifat informal. Secara praktis, interaksi dengan badan pemerintah seringkali berbentuk jangka pendek dan informal. LSM di tingkat kota/kabupaten cenderung hanya berinteraksi sesekali dengan badan pemerintah (Interaksi dengan anggota dewan sedikit lebih sering.) Interaksi dengan pihak swasta jauh lebih rendah daripada dengan pemerintah. Selain itu, interaksi yang ada pun lebih didorong oleh hubungan pribadi ketimbang kelembagaan; jaringan pribadi dan kedekatan dengan para aktor berpengaruh dapat membantu mengembangkan hubungan jangka panjang yang lebih kuat bagi sejumlah LSM. Lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan dan koneksi seperti ini seringkali tidak memiliki akses yang dibutuhkan untuk menjalin kerja sama. Isu mengenai peran pihak swasta dalam mendukung LSM juga merupakan persoalan di tingkat internasional.⁴⁷ Upaya untuk membuka jaringan dan koneksi khusus dengan lembaga *corporate social responsibility* milik pihak swasta dan individu-individu kaya (*philanthropists*) merupakan tantangan bagi banyak LSM dikarenakan oleh perbedaan pandangan mengenai nilai-nilai antar lembaga serta kekhawatiran LSM bahwa kredibilitas lembaga dapat terancam bila menerima dana dari praktik-praktik bisnis yang korup dan ilegal.⁴⁸ Namun di saat yang sama, baik secara global maupun di Indonesia, bekerja sama dengan pihak swasta dirasa makin diperlukan guna mengatasi permasalahan sosial.⁴⁹

5 Temuan dan kesimpulan

Hasil temuan penelitian yang dilakukan untuk proses desain NSSC yang dijabarkan dalam seri ini menggarisbawahi keterkaitan isu-isu seputar pendanaan LSM, jaringan, manajemen dan kepemimpinan dan keberlanjutan sektor LSM Indonesia secara keseluruhan. Ringkasan hasil temuan dari penelitian lapangan yang lengkap dapat dibaca di Lampiran 2.

Tema utama penelitian dan konsultasi dengan para pemangku utama yang dilakukan saat proses desain menekankan pentingnya menciptakan suatu sektor LSM yang kuat dan berkelanjutan yang:

- > memiliki hubungan kerja sama yang setara dan konstruktif dengan pihak pemerintah dan pihak swasta;
- > memiliki tata kelola yang baik, kemandirian dan akuntabilitas; serta
- > memiliki sumber pendanaan yang cukup dan beragam.

Sebagaimana dibahas dalam ketiga laporan singkat lainnya dalam seri riset ini, LSM di Indonesia tengah menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang mengancam keberlanjutan sektor LSM. Tantangan-tantangan ini muncul karena kebergantungan sektor LSM di Indonesia (maupun di negara lain) pada lembaga donor internasional untuk dukungan dana, serta kurangnya kapasitas dalam sumber daya manusia, kepemimpinan dan berjejaring. Ketiga laporan singkat berikutnya dalam seri ini menekankan keterkaitan isu-isu yang muncul dari temuan penelitian, yaitu:

- > diversifikasi pendanaan;
- > manajemen sumber daya manusia dan kepemimpinan; dan
- > jaringan dan hubungan antar LSM dan antara LSM dengan para pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah dan pihak swasta.

Isu-isu ini relevan untuk memastikan keberlanjutan lembaga individu maupun sektor LSM secara keseluruhan. Kestabilan keuangan dapat memastikan bahwa LSM dapat mempertahankan kemandiriannya, meningkatkan cara kerjanya, mengembangkan generasi pemimpin LSM baru, dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan pemerintah, pihak swasta dan LSM lainnya. Dengan

⁴⁷ CIVICUS, 2015; World Economic Forum, 2013.

⁴⁸ CIVICUS, 2015.

⁴⁹ CIVICUS, 2015, hal. 11.

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kepemimpinan yang kuat, LSM dapat menjadi lebih akuntabel dan efektif dalam kerja-kerjanya, yang selanjutnya dapat meningkatkan posisinya dalam mencari berbagai peluang pendanaan dan berjejaring dengan LSM lainnya dan pemangku kepentingan lainnya. Jaringan dan koalisi yang kuat juga dapat memberikan dukungan pembangunan kapasitas bagi LSM untuk meningkatkan kemampuan teknisnya dan mengenalkan pada sumber daya dan sumber dana yang beragam. Siklus ini dapat berlanjut dengan sendirinya dan mengarah pada keberlanjutan.

Rekomendasi-rekomendasi yang dijabarkan dalam ketiga laporan singkat lainnya menggarisbawahi beberapa strategi khusus dan tindak lanjut bagi LSM Indonesia, pemerintah nasional dan daerah serta para pemegang kepentingan lainnya yang berkepentingan untuk mendukung sektor LSM Indonesia yang kuat agar dapat meneruskan kerja-kerja yang penting dalam pembangunan, mendukung demokrasi, dan mengatasi isu-isu keadilan sosial yang penting.

6 Referensi

- Afif, S. (n.d.). *The Rising of Middle Class in Indonesia: Opportunity and Challenge*. Diambil dari <http://www.umdcipe.org/conferences/DecliningMiddleClassesSpain/Papers/Afif.pdf>
- Aldaba, F., Antezana, P., Valderrama, M., dan Fowler, A. (2000). *NGO Strategies Beyond Aid: Perspectives from Central and South America and the Philippines*. *Third World Quarterly*, 21(4), 669–683.
- Antlov, H., Brinkerhoff, D. W., dan Rapp, E. (2008). *Civil Society Organisations and Democratic Reform: Progress, Capacities, and Challenges in Indonesia*. Dipresentasikan pada The 37th Annual Conference, Association for Research on Nonprofit Organisations and Voluntary Action, Philadelphia: RTI International. Diambil dari https://rti.org/pubs/Antlov_CSOs_in_Indo_ARNOVA.pdf
- Antlöv, H., Brinkerhoff, D. W., dan Rapp, E. (2010). *Civil Society Capacity Building for Democratic Reform: Experience and Lessons from Indonesia*. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organisations*, 21(3), 417–439. <http://doi.org/10.1007/s11266-010-9140-x>
- Antlöv, H., Ibrahim, R., dan van Tuijl, P. (2006). *NGO Governance and Accountability in Indonesia: Challenges in a Newly Democratising Country*. *NGO Accountability : Politics, Principles and Innovations*, 147–163.
- Aritonang, Yusran, F., Taufik, dan Promedia. (2009). *Accountability Survey of Non-Profit Organisations (NPO) in Indonesia: A Preliminary Review*. Indonesia: International Programme of the Charity Commission for England and Wales.
- Ashman, D., Carter, L., Goodin, J., dan Timberman, D. (2011, July 21). *Intermediate Support Organizations (ISOs): Partners in Strengthening Local Civil Society*. Management Systems International (MSI). Diambil dari <http://www.msiworldwide.com/wp-content/uploads/Intermediate-Support-Organizations.pdf>
- Asian Development Bank. (2015). *Asian Development Outlook: Financing Asia's Future Growth*. Metro Manila: Asian Development Bank.
- AusAID. (2012). *AusAID Civil Society Engagement Framework [Text]*. Diambil pada tanggal 19 Mei, 2015, dari <http://reliefweb.int/report/world/ausaid-civil-society-engagement-framework>
- CIVICUS. (2013). *The CIVICUS' 2013 Enabling Environment Index*. Diambil dari http://civicus.org/eei/downloads/Civicus_EEI%20REPORT%202013_WEB_FINAL.pdf
- CIVICUS. (2015). *State of Civil Society Report*. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation. Diambil dari <http://civicus.org/images/StateOfCivilSocietyFullReport2015.pdf>
- Diskusi Inisiasi Advokasi RUU Perkumpulan. (2011, March 9). [Berita Umum Konsil LSM]. Diambil dari <http://konsillsm.or.id/?p=768&lang=en>
- Edelman. (2014). *Trust in Asia Pacific, Middle East and Africa – 2014 Trust Barometer*. Diambil pada tanggal 2 Agustus, 2015, dari <http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2014-edelman-trust-barometer/trust-around-the-world/trust-in-asia-pacific-middle-east-africa/>
- Edelman. (2015). *Trust in Asia Pacific, Middle East and Africa – 2015 Trust Barometer*. Diambil pada tanggal 2 Agustus, 2015, dari <http://www.edelman.com/2015-edelman-trust-barometer/trust-around-world/trust-asia-pacific-middle-east-africa-2015/>
- FHI 360, CAP, dan USAID. (2011, October). *NGO Tips: Incorporating Sustainability Plans into Grant Programs*. Diambil dari <http://www.ngoconnect.net/documents/592341/749044/NGOTips+-+Incorporating+Sustainability+Plans+into+Grant+Programs>
- Fitri, F., Indiyastutik, S., Santoso, S. A., Sujito, A., Hapsari, I., Megawati, Mujahid, F. (2014). *Indeks Masyarakat Sipil 2012: Memasuki Arena Kuasa, Belajar dari Kebangkitan Masyarakat Sipil di 16 Kabupaten/Kota*. YAPPIKA and Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase II.

- Ibrahim, R. (2006). Indonesian Civil Society 2006: A Long Journey to A Civil Society. YAPPIKA, with Support from ACCESS and Australia Indonesia Partnership. Diambil dari http://www.civicus.org/new/media/CSI_Indonesia_Country_Report.pdf
- Ibrahim, R., dan et al. (2009). *Masalah dan Tantangan LSM Indonesia: Bagaimana Memperkuat LSM dan Meningkatkan Pelayanan Publik* (Report to DSF). DSF.
- Low, W., dan Davenport, E. (2002). NGO capacity building and sustainability in the Pacific. *Asia Pacific Viewpoint*, 43(3), 367–379.
- McCarthy, P., dan Kirana, C. (2006). *The Long and Still Winding Road: A Study of Donor Support to Civil Society in Indonesia* (Studi yang dikomisikan oleh DSF). Indonesia: DSF.
- Mietzner, M., dan East-West Center. (2015). *Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia*. Honolulu, HI: East-West Center. Diambil dari <http://www.eastwestcenter.org/system/tdf/private/ps072.pdf?file=1&type=node&id=35018>
- Okorley, E. L., dan Nkrumah, E. E. (2012). Organisational Factors Influencing Sustainability of Local Non-Governmental Organisations: Lessons from a Ghanaian Context. *International Journal of Social Economics*, 39(5), 330–341.
- Parlina, I., dan Halim, H. (2013, December 19). New Law Allows Direct Cash Payment to Villages. *The Jakarta Post*. Jakarta. Diambil dari <http://www.thejakartapost.com/news/2013/12/19/new-law-allows-direct-cash-payment-villages.html>
- Pellini, A., Angelina, M., dan Purnawati, E. (2014). Working politically: A Story of Change of the contribution of research evidence to the new Village Law in Indonesia. Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) and Knowledge Sector Initiative (KSI). Diambil dari <http://www.ksi-indonesia.org/index.php/publications/2014/02/18/17/story-of-change-indonesia-039-s-new-village-law-revised-edition.html>
- PRIA. (2012). Civil Society at Crossroads. Shift, Challenges, Options? Society for Participatory Research in Asia (PRIA). Diambil dari <http://www.intrac.org/data/files/resources/757/Civil-society-at-a-Crossroads-Global-Synthesis-Report.pdf>
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Organisasi Masyarakat. (2011).
- Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum. (1870). Diambil dari <http://www.icnl.org/research/library/files/Indonesia/Staatsblad1870.pdf>
- STATT. (2012, November). NGO Sector Review Findings Report. STATT. Diambil dari <http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/indo-ks15-ngo-sector-review-phase1.pdf>
- Suaedy, A. (2014). The Role of Volunteers and Political Participation in the 2012 Jakarta Gubernatorial Election. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 33(1), 111–138.
- Synergos Institute. (2002). *National Directory of Civil Society Resource Organisations: Indonesia* (Series on Foundation Building In Southeast Asia). Diambil dari <http://www.synergos.org/knowledge/02/indonesiacsrodirectory.pdf>
- World Economic Forum. (2013). The Future Role of Civil Society (World Scenario Series). World Economic Forum. Diambil dari http://www3.weforum.org/docs/WEF_FutureRoleCivilSociety_Report_2013.pdf
- Winder, D. (1998). Civil Society Resource Organisations and Development in Southeast Asia: A Summary of Findings. *Series on Foundation Building in Southeast Asia, The Synergos Institute, New York*. Diambil dari <http://www.synergos.org/knowledge/98/csrosinasia.pdf>

Lampiran 1: Metodologi

Antara pertengahan tahun 2014 dan awal tahun 2015, suatu tim yang ditugaskan untuk merancang fasilitas dukungan sektor LSM atas nama DFAT Australian Aid memulai sejumlah kegiatan penelitian yang intensif. Penelitian tersebut memastikan bahwa proses desain didukung dan divalidasi oleh bukti mengenai kebutuhan dan tujuan-tujuan sektor LSM di Indonesia. Hasil temuan utama dari program penelitian tersebut juga telah digunakan secara luas untuk menghasilkan beberapa laporan singkat dalam seri ini. Penelitian metode campuran termasuk melakukan penelitian lapangan awal yang terdiri dari survei LSM serta penelitian kualitatif yang menyasar berbagai pihak dari berbagai latar belakang, suatu analisis jaringan berdasarkan data lapangan, ulasan program-program DFAT di Indonesia, serta penelitian literatur. Penelitian ini dibangun berdasarkan penelitian sebelumnya yang juga didukung oleh DFAT yang dilakukan pada tahun 2012, yakni Laporan *NGO Sector Review*.⁵⁰

Tujuan utama dari *NGO Sector Review* adalah untuk mempelajari LSM, sektor LSM dan hubungan-hubungannya dengan sektor lain guna mengidentifikasi daerah-daerah dimana DFAT dapat melakukan investasi program secara strategis yang berkontribusi untuk memenuhi tujuan-tujuan pengurangan kemiskinan pemerintah Australia di Indonesia. Ulasan ini terdiri dari suatu tinjauan literatur terstruktur, penelaahan media, penelitian lapangan terbatas di dua kabupaten di Indonesia, konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam dan di seputar sektor LSM serta analisis dan pemetaan data kuantitatif. Laporan ini juga mencakup analisis awal data keuangan Australian Aid. Hasil temuan ulasan tersebut membantu DFAT untuk mengidentifikasi rangkaian pertanyaan untuk penelitian lebih lanjut serta metodologi yang secara langsung memberi masukan untuk penelitian tahun 2014-2015 bagi desain NSSC yang diuraikan dalam lampiran metodologi ini. Pertanyaan-pertanyaan penelitian dan tema-tema yang muncul pada tahun 2012 terdapat dalam laporan final.⁵¹ Metodologi ini dikumpulkan secara terpisah, dibangun dari laporan awal (*inception report*) untuk proyek desain NSSC dan pada akhirnya dicerminkan dalam kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan dijelaskan di bawah ini.

Pertanyaan Penelitian dan Tema

Mempertimbangkan bahwa sasaran DFAT dalam penelitian NSSC adalah untuk menghasilkan rancangan suatu fasilitas, serangkaian pertanyaan desain digunakan untuk menentukan tema-tema dan pertanyaan untuk diteliti dalam kegiatan penelitian. Menyusul pengembangan konsep dan model logika awal untuk fasilitas pada bulan Juni 2014, tim lalu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan desain dan penelitian yang mencerminkan kesenjangan dalam pengetahuan sebagaimana diidentifikasi dalam *NGO Sector Review* maupun prioritas-prioritas yang muncul sejak laporan tersebut dikeluarkan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup:

- > fokus fasilitas: lokasi, sektor, jenis organisasi;
- > kegiatan-kegiatan dan praktik-praktik baik untuk diadopsi;
- > kemitraan dan tata kelola termasuk mencari tuan rumah lembaga dalam pemerintah Indonesia;
- > garis waktu dan keberlanjutan / strategi pengakhiran untuk NSSC;
- > ketersediaan faktor-faktor pendukung untuk memastikan keberhasilan kegiatan-kegiatan kunci;
- > pendekatan monitoring dan evaluasi yang tepat;
- > pendekatan yang paling tepat untuk pengarusutamaan dan inklusi gender; dan
- > hubungan dengan program-program DFAT dan lembaga-lembaga donor atau pemerintah Indonesia.

⁵⁰ Lihat STATT, 2012.

⁵¹ Ibid.

Kegiatan-kegiatan penelitian difokuskan pada kedua pertanyaan pertama, yaitu fokus fasilitas, prioritas kegiatan dan praktik-praktik baik yang perlu diadopsi oleh fasilitas, yang dilakukan lewat penelaahan atas pertanyaan-pertanyaan berikut:

- > Dalam bidang apa saja dan bagaimana LSM secara individu dapat menjadi lebih kuat?
- > Dalam bidang apa saja dan bagaimana hubungan-hubungan dalam sektor, termasuk peran lembaga pendukung, dapat menjadi lebih kuat?
- > Dalam bidang apa saja dan bagaimana lingkungan tempat LSM beroperasi dapat berubah agar dapat mendukung operasi dan program-program LSM?
- > Bagaimana bantuan dari Australia dapat mendukung upaya-upaya sektor LSM secara strategis untuk mencapai sektor yang mapan dalam jangka panjang?

Masing-masing kegiatan penelitian memiliki rangkaian pertanyaan dan metodologinya sendiri yang akan diuraikan dalam Lampiran ini.

Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan terdiri dari survei mendalam terstruktur pada 105 LSM daerah di tujuh kota/kabupaten di empat provinsi, serta 52 LSM nasional/ pendukung. Wawancara semi-terstruktur dan diskusi kelompok terarah (FGD) diselenggarakan di tujuh kota/kabupaten dengan 214 orang yang berbeda dari pemerintah kota/kabupaten, pihak swasta dan LSM. Ada 361 orang yang berbeda secara keseluruhan yang terlibat dalam survei, wawancara, atau berpartisipasi dalam FGD untuk penelitian ini.

Pertanyaan-pertanyaan kunci

Berdasarkan hasil Laporan *NGO Sector Review 2012* dan pengetahuan anggota penelitian mengenai perkembangan sektor LSM terkini, penelitian lapangan mencakup beberapa tema, seperti:

- > peranan dan fungsi LSM;
- > jaringan dan hubungan antar LSM;
- > hubungan LSM dengan pemerintah dan pihak swasta;
- > lingkungan pendukung, seperti kebijakan, pelayanan, kesetaraan gender dan inklusivitas yang mempengaruhi kemampuan LSM untuk memenuhi peranannya;
- > tingkat dan sumber pendanaan LSM;
- > akuntabilitas, struktur tata kelola dan rangkaian proses LSM; dan
- > sumber daya manusia, kepemimpinan yang efektif dan manajemen kelembagaan.

Penyeleksian Lokasi

Unit utama dalam penelitian lapangan adalah kota atau kabupaten dimana LSM beroperasi. Kerangka kerja ini membantu untuk mencari tahu seberapa efektif LSM dalam mencapai tujuan-tujuannya dalam konteks lokal, serta untuk meneliti pendanaannya serta hubungan lokal dengan pihak swasta / pemerintah maupun dengan lembaga di tingkat nasional dan donor. Kota dan kabupaten penelitian lapangan dipilih berdasarkan kriteria di bawah ini, yang dikembangkan untuk menyeimbangkan berbagai konteks yang berbeda dari sisi keterwakilan wilayah, bidang/isu, lokasi yang mengalami syok seperti bencana alam, dan antara lokasi yang mendapatkan pendanaan DFAT dan yang tidak:

- > Masing-masing satu provinsi di pulau Jawa, Indonesia bagian Timur, Indonesia bagian Barat, terkecuali daerah-daerah yang telah dikunjungi pada saat *NGO Sector Review* (yaitu Kalimantan Barat dan wilayah Timor Barat di NTT).

- > Di tiap provinsi, dua kota atau kabupaten dipilih, satu terletak di ibukota provinsi dan satunya terletak jauh dari ibukota. Persebaran geografis ini membantu menangkap lingkungan kerja LSM serta akses terhadap infrastruktur yang berbeda.
- > Di keenam lokasi ini, dipilih campuran beberapa daerah di mana ada LSM yang bergerak di isu-isu 'panas' terkait pelayanan dan advokasi (seperti penebangan hutan dan hak tanah) yang relevan dengan konteks lokal, serta tempat-tempat dengan fokus pada isu umum (seperti kesehatan), maupun campuran daerah yang homogen dan beragam (baik secara etnis maupun agama).
- > Lokasi ke-tujuh dipilih dari provinsi yang berbeda sebagai daerah 'paska-syok'; contohnya Aceh, Padang, Mentawai, dan Ambon.
- > Di antara ketujuh lokasi, para peneliti berupaya untuk mencapai keseimbangan antara lokasi-lokasi target pendanaan DFAT dan lokasi-lokasi target non-DFAT.

Menggunakan kriteria di atas juga membantu merekam keberagaman dalam hal persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan serta PDB daerah, dan dilakukan penyesuaian terhadap lokasi-lokasi tersebut untuk menangkap keberagaman tersebut.

Berdasarkan kriteria di atas, dipilih sejumlah kota/kabupaten dalam empat provinsi sebagai berikut:

- > Sulawesi Tengah: Kabupten Sigi dan Toli Toli.
- > Jawa Timur: Kabupaten Kediri dan Situbondo.
- > Jambi: Kabupaten Muoro Jambi dan Merangin.
- > Sumatera Barat: Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam praktiknya, ada LSM di beberapa lokasi yang bekerja di beberapa kabupaten yang berbeda (contohnya, LSM di Padang Pariaman cenderung berkantor di Kota Pariaman karena terjadi pemekaran kabupaten dalam lima tahun terakhir). Realitas di lapangan seperti ini turut dipertimbangkan saat mengidentifikasi responden di suatu lokasi.

Responden dan Pengumpulan Data – Survei LSM

Untuk LSM kota/kabupaten, anggota tim penelitian dan desain NSSC membuat daftar 15 LSM sasaran pada saat melakukan pra-survei di masing-masing lokasi. Daftar tersebut dikembangkan menggunakan metode pengambilan sampel 'snowball' dimana lembaga mitra tim NSSC di lapangan beserta beberapa narasumber kunci (yang diidentifikasi lewat jaringan tim dan daftar dari data *NGO Sector Review*) memberikan referensi LSM-LSM yang berpotensi aktif di kota atau kabupaten beserta profil dan kontak informasi lembaga tersebut. Ketika memungkinkan, individu dari organisasi tambahan juga memberikan referensi lainnya. Daftar LSM tersebut kemudian ketika memungkinkan di *cross check* dengan daftar LSM yang terdaftar di pemerintah daerah. Selanjutnya, daftar LSM tersebut sebisa mungkin ditriangulasi dengan individu-individu yang tidak secara langsung terlibat menjadi mitra kerja tim NSSC di lapangan.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, anggota tim yang melakukan pra-survei memberikan daftar LSM sasaran kepada tim survei, merangking berdasarkan tingkat kepentingan dalam konteks lokal berdasarkan kesan yang didapatkan dalam pra-survei. Di beberapa lokasi, 15 lembaga LSM terpilih tersebut mewakili sampel LSM lokal, sehingga diusahakan dapat memastikan bahwa responden survei tersebut dapat mewakili sektor lokal secara keseluruhan. Ada beberapa lokasi lainnya yang tidak memiliki jumlah LSM yang begitu banyak, sehingga daftar 15 lembaga dapat mewakili hampir semua LSM lokal aktif.

Sampel dari LSM nasional dipilih dari daftar yang dibuat pada tahun 2012, yang diperbarui berdasarkan pengetahuan tim penelitian, diprioritaskan berdasarkan tingkat keaktifan lembaga dan apakah lembaga tersebut berperan penting dalam memberi dukungan pada LSM lainnya, atau memainkan peran tunggal di tingkat nasional. Responden individu yang mewakili tiap LSM dipilih

berdasarkan posisinya dalam kepemimpinan atau struktur manajemen lembaga serta pengetahuannya mengenai isu-isu manajemen lembaga dan program.

Survey awal (pra-tes) untuk mengetes validitas dan konsistensi pertanyaan penelitian dalam kuesioner dilakukan pada 2-5 Juli 2014 untuk LSM lokal, dan pada tanggal 28-29 August 2014 untuk LSM nasional. Berdasarkan hasil isurvey awal tersebut, dilakukan beberapa revisi dan perubahan pada konten kuesioner survei final. Sejumlah 16 pensurvei yang bergelar sarjana serta memiliki pengalaman melakukan survei direkrut dan dilatih di Blitar pada tanggal 10-14 Juli 2014.

Pengumpulan data dilakukan antara tanggal 15 Agustus – 18 September 2014. Pada akhirnya, ada 105 LSM lokal di tujuh kota/kabupaten yang disurvei lewat wawancara langsung (dengan tingkat respon 100%). Ada 42 LSM nasional yang disurvei (dengan tingkat respon 77% dari 54 LSM yang diidentifikasi untuk wawancara). Di antara LSM nasional, ada 30 yang berlokasi di Jakarta dan Yogyakarta yang disurvei lewat wawancara langsung, sedangkan ada 12 LSM dari Aceh, Jambi, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Papua yang diwawancara lewat telpon. Menggunakan metode pengumpulan data berbasis komputer, entri data yang mencakup verifikasi data dan editing dilakukan di lokasi wawancara dengan pengawasan seorang koordinator lapangan untuk menjaga kualitas yang tinggi dan memastikan bahwa data survei yang valid direkam dengan baik.

Pengumpulan data – Wawancara dan Diskusi Kelompok Terarah (FGD)

Pengumpulan data kualitatif terdiri dari wawancara dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan para peserta dari LSM lokal, badan pemerintah, dan pihak swasta antara tanggal 1-27 September 2014. Enam peneliti lapangan kualitatif dengan tingkat pendidikan minimal sarjana dan berpengalaman dalam penelitian lapangan dikontrak khusus untuk mengumpulkan data kualitatif di bawah pengawasan anggota inti tim penelitian.

Serangkaian kriteria dikembangkan untuk memilih informan dari LSM lokal yang diundang untuk berpartisipasi dalam penelitian. Kriteria tersebut berfokus pada keberagaman dalam hal ukuran (besar kecil) lembaga⁵² dan bidang isu yang menjadi fokus LSM. Para peserta yang terlibat berasal dari organisasi kecil, menengah, dan besar, dan dari berbagai LSM dalam bidang yang beragam, termasuk lingkungan hidup, pemberdayaan, HAM, kesehatan, dan kelompok minoritas, seperti masyarakat adat. Sama halnya dengan survei, perwakilan dari tiap LSM dipilih berdasarkan posisinya dalam kepemimpinan atau struktur manajemen lembaga serta pengetahuannya mengenai isu-isu manajemen lembaga dan program. Beberapa pejabat pemerintah dan pengelola program pembangunan masyarakat sektor swasta atau pengelola *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan diidentifikasi berdasarkan ada atau tidaknya hubungan dengan LSM. Daftar awal individu dari pemerintah dan pihak swasta diidentifikasi pada saat pra-interview; namun para pewawancara juga menggunakan metode pengambilan sampel sistem *snowball* sebagaimana dijelaskan di atas untuk mengidentifikasi lebih banyak peserta dari kedua kelompok tersebut.

Analisis data

Dalam melakukan survei, para peneliti dari SurveyMETER menganalisa data menggunakan perangkat lunak statistik STATA. Tujuan dari analisis tersebut adalah untuk memberikan informasi dasar profil LSM serta untuk menganalisis perbedaan antara

- > LSM nasional, provinsi dan kota/kabupaten;
- > LSM dengan ukuran anggaran yang beragam; dan
- > cabang LSM yang lebih besar atau koalisi jaringan LSM atau organisasi mandiri.

Untuk data kualitatif, suatu lokakarya analisis data diselenggarakan pada bulan Oktober 2014. Sasaran utama dalam lokakarya ini adalah untuk membandingkan dan membedakan hasil temuan dari provinsi yang berbeda serta dari kota/kabupaten yang berbeda berdasarkan karakteristik yang

⁵² Kategori lembaga berdasarkan kecil, menengah, dan besar didasarkan pada jumlah staf dan kriteria lain termasuk jumlah program yang sedang berjalan, ukuran dana, dan apakah organisasi memiliki kantor..

berbeda, seperti jauh atau dekat dengan ibukota provinsi. Analisa data mencakup mengidentifikasi tren-tren umum dan tema-tema baru; mencari hubungan antar tema; merangkum hasil temuan dan implikasi; serta memahami konteks berdasarkan hasil temuan. Terakhir, dalam rangka menghubungkan antara hasil temuan survei dengan penelitian kualitatif, dilakukan sejumlah lokakarya internal pada bulan Oktober dan November 2014. Lampiran 2 merupakan rangkuman dan temuan kunci penelitian dari hasil dari lokakarya tersebut serta informasi mengenai konteks yang berasal dari ulasan program DFAT yang dijelaskan di bawah.

Ulasan Data Program DFAT

Kegiatan ini terdiri dari analisis terstruktur tentang hasil-hasil, pengeluaran keuangan dan pembelajaran dari 155 program yang didanai oleh DFAT yang bekerja sama dengan LSM Indonesia antara tahun 2007–2014.⁵³ Untuk semua proyek, dikumpulkan informasi standar (jika ada dan mungkin) mengenai isu-isu dan program-program yang didukung, daerah geografis, dan informasi mengenai LSM yang menerima dukungan serta jenis dukungan yang diberikan. Kegiatan ini juga meliputi survei *online* terbatas, wawancara individu dan FGD yang menyoal LSM yang pernah bermitra dengan DFAT. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi penting mengenai bagaimana Australian Aid dapat memberi dukungan paling strategis terhadap upaya-upaya sektor LSM Indonesia untuk mencapai sektor yang mapan dalam jangka panjang. Dengan mendokumentasikan hubungan kerja sama DFAT dengan LSM di Indonesia, diharapkan dapat memberikan informasi untuk menjawab empat pertanyaan kunci sebagai berikut:

1. Berapa banyak pendanaan yang telah diberikan oleh DFAT kepada LSM Indonesia?
2. Apa saja jalur pemberian dana utama kepada LSM Indonesia?
3. Bagaimana hubungan kerja sama dengan LSM Indonesia berkontribusi untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan DFAT?
4. Bagaimana DFAT berupaya untuk menguatkan LSM Indonesia, dan apakah telah berhasil?

Hasil temuan kegiatan ini digunakan secara langsung untuk memberi masukan pada perkembangan desain NSSC, pengembangan seri riset ini, serta memberikan tinjauan program DFAT dengan beberapa rekomendasi mengenai cara bekerja sama dengan LSM secara efektif. Semua temuan diserahkan pada DFAT pada bulan Agustus 2015.

Analisis jaringan

Dua orang spesialis dalam bidang Analisis Jaringan Sosial (*Social Networks Analysis /SNA*), Lassa dan Liu yang juga tim penulis laporan mengenai jaringan dalam seri riset ini, menganalisis data dari penelitian lapangan dan data ulasan DFAT menggunakan pendekatan SNA.

Penelitian SNA bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang:

- > sifat jaringan LSM di Indonesia dan menarik kesimpulan mengenai bagaimana sifat-sifat jaringan berkaitan dengan keberlanjutan dan lingkungan pendukung bagi LSM;
- > apa saja yang dapat dilakukan oleh berbagai pelaku untuk mendorong pengembangan sifat-sifat tersebut dalam lingkungan LSM Indonesia;
- > hubungan (koneksi) antara dan di kalangan LSM Indonesia;
- > hubungan (koneksi) antara LSM, pelaku pemerintah, dan pelaku pihak swasta; dan
- > hubungan antara LSM dan lembaga donor, khususnya DFAT.

⁵³ Tim juga melakukan ulasan literatur terstruktur dari laporan publik mengenai program dari tujuh lembaga donor lainnya di Indonesia yang memiliki banyak hubungan kerja sama dengan LSM, dengan berfokus pada program-program yang diimplementasikan antara tahun 1999-2015 serta laporan publik mengenai 25 program terkait di negara-negara lainnya dengan konteks ekonomi atau politik serupa, dengan berfokus pada program-program yang diimplementasikan antara tahun 2007-2015.

Pertanyaan-pertanyaan mengenai hubungan dan koneksi merujuk pada konsep-konsep SNA yaitu sentralitas, densitas, struktur, dan kestabilan hubungan; kegunaan dan dampaknya; serta pengaruh arus informasi/ pelayanan / pertukaran materi. Rincian mengenai pendekatan metodologi SNA dijabarkan dalam laporan Lassa dan Liu.


Ulasan Literatur

Tim desain juga melakukan ulasan literatur terstruktur dari literatur dan laporan-laporan mengenai topik-topik terkait, termasuk peran LSM internasional, konsep keberlanjutan serta kekuatan dan kekurangan lembaga-lembaga pendukung dan sumber daya di Indonesia. Tujuan dari ulasan literatur perbandingan internasional adalah untuk menelaah tren-tren internasional dan pemikiran terkini mengenai masyarakat sipil dan LSM. Seorang peneliti literatur menulis laporan singkat mengenai tiap topik yang digunakan untuk memberi masukan dalam proses desain NSSC dan Seri Riset NSSC.


Lampiran 2: Ringkasan Hasil Temuan Penelitian

Slide 1

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design


Australian Aid 

Kesimpulan Hasil Temuan Penelitian

 **Cardno** Shaping the Future This Australianaid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno. 1


Slide 2

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design

Australian Aid 

Latar Belakang

Slide-slide berikut dalam merupakan konsolidasi temuan dari penelitian metode campuran yang dilakukan oleh Tim Desain NSSC pada 2014-2015. Lihat Lampiran 1 dari tulisan pendahuluan Seri Riset untuk penjelasan metodologi yang lebih rinci. Slide ini juga merupakan hasil dari serangkaian lokakarya yang diadakan pada Oktober-November 2014 yang melibatkan anggota tim riset dan desain, dan ditulis oleh beberapa peneliti dan kontributor proyek.

 **Cardno** Shaping the Future This Australianaid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno. 2

Slide 3

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Latar Belakang (Lanjutan)

Tujuan dari lokakarya hasil temuan penelitian adalah untuk:

- Mendiskusikan temuan riset dari data penelitian lapangan (kuantitatif dan kualitatif), dan data tinjauan program DFAT;
- Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan diantara temuan-temuan lintas komponen riset dan lintas topik/isu untuk pembuatan desain NSSC;
- Mengkonsolidasi dan mengidentifikasi celah dalam temuan riset dan mendapatkan umpan balik dari tim dan penasehat untuk perbaikan akhir dari temuan-temuan yang dihasilkan



Cardno
Shaping the Future

This Australian aid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

3

Slide 4

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Proses/Metode – Lokakarya analisa

- Presentasi
 - Sumber daya manusia, hubungan dan interaksi antar pemangku kepentingan (pemerintah dan pihak swasta; antar LSM), pendanaan dan akuntabilitas, aspirasi
 - Perbedaan antara wilayah penelitian yang dekat dan jauh dari ibukota propinsi dan yang berada di ibukota propinsi (dimana ukuran sampel cukup besar)
 - Perbedaan antara respons lokal dan nasional
- Diskusi
 - Apa kesamaan dan perbedaan antara temuan-temuan kualitatif dan kuantitatif?
 - Apa saja hal-hal yang menarik dari data?
 - Apa-apa yang kurang jelas dari data dan perlu diteliti lagi?
 - Lain-lain
- Kesimpulan → hasil temuan dari 'aspirasi' untuk langkah-langkah NSSC berikutnya

Catatan: Mohon diingat—ini merupakan penelitian di tingkat kabupaten/kota. Data dari survei nasional belum ditelaah secara keseluruhan. Interaksi di tingkat nasional masih bersifat kurang terstruktur dan mengandalkan pengembangan relasi



Cardno
Shaping the Future

This Australian aid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

4

Slide 5

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



PROFIL & PERSEPSI LSM-LSM



This Australian aid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno. 5

Slide 6

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



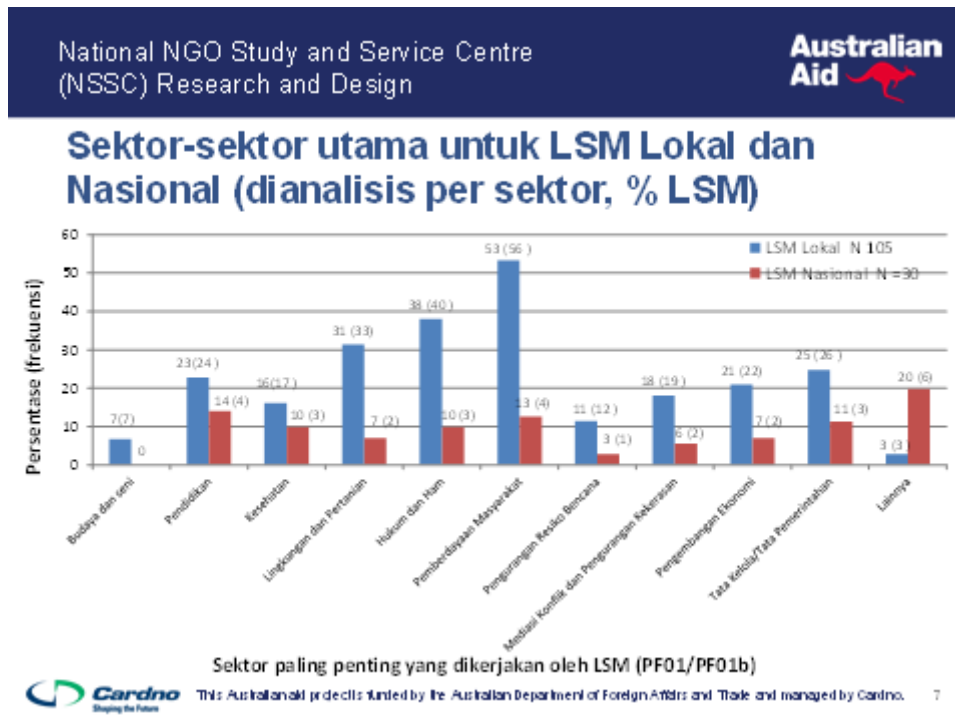
Temuan-temuan kunci: Fokus sektoral utama LSM

- Berdasarkan jawaban survei, ada banyak perbedaan penting antara LSM lokal dan nasional
- Lokal: sektor-sektor utama – **Pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM**, Lingkungan dan Pertanian, dan **Tata Kelola / Tata Pemerintahan**; ada beberapa untuk Pengembangan Ekonomi dan Pendidikan
- Namun, fokus sektoral dari sampel lokal mencerminkan sifat daerah pelaksanaan survei. Mohon lihat hasil penelitian NSSC 2012 di NTT dan tempat lainnya dimana isu kesehatan adalah fokus utama.
- Nasional: Pendidikan, **Tata Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat**, beberapa untuk Kesehatan, dan **Hukum dan HAM**; ukuran sampel kecil.



This Australian aid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno. 6

Slide 7



Slide 8

National NGO Study and Service Centre (NSSC) Research and Design

Australian Aid

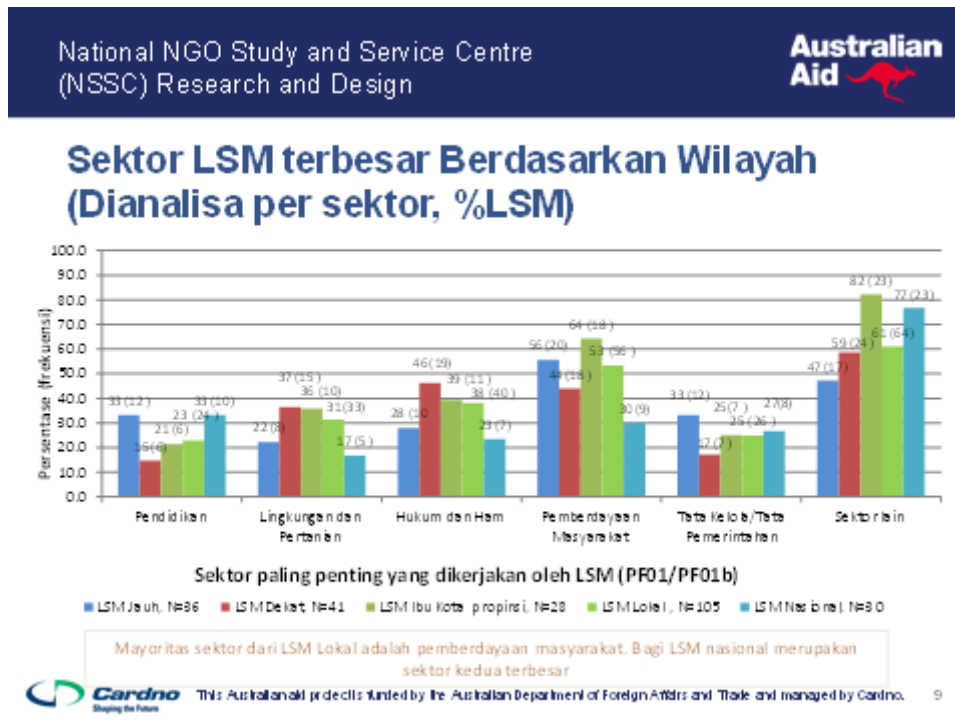
Berdasarkan lima sektor utama....

Catatan: jumlah sampel mencukupi untuk dapat mengomentari mengenai sektor Pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM, Lingkungan dan Pertanian untuk LSM lokal.

- Untuk ketiga sektor tersebut, penyebaran LSM di tingkat daerah (propinsi, dekat ibukota propinsi, dan jauh dari ibukota propinsi) cukup merata berdasarkan fokus sektor, namun:
 - LSM yang kantornya berada di dekat atau di ibukota propinsi, secara signifikan lebih besar kemungkinan untuk berfokus pada Hukum dan HAM serta isu Lingkungan dibandingkan LSM yang terletak di kabupaten yang jauh
 - LSM yang letaknya jauh dibandingkan yang berada di dekat (tapi tidak di) ibukota propinsi, secara signifikan lebih besar kemungkinan untuk berfokus pada isu Pemberdayaan Masyarakat, sama halnya dengan LSM yang berada di ibukota propinsi

Cardno Shaping the Future

Slide 9



Slide 10

National NGO Study and Service Centre (NSSC) Research and Design

Australian Aid

Temuan kunci: Fokus kegiatan LSM nasional dan lokal

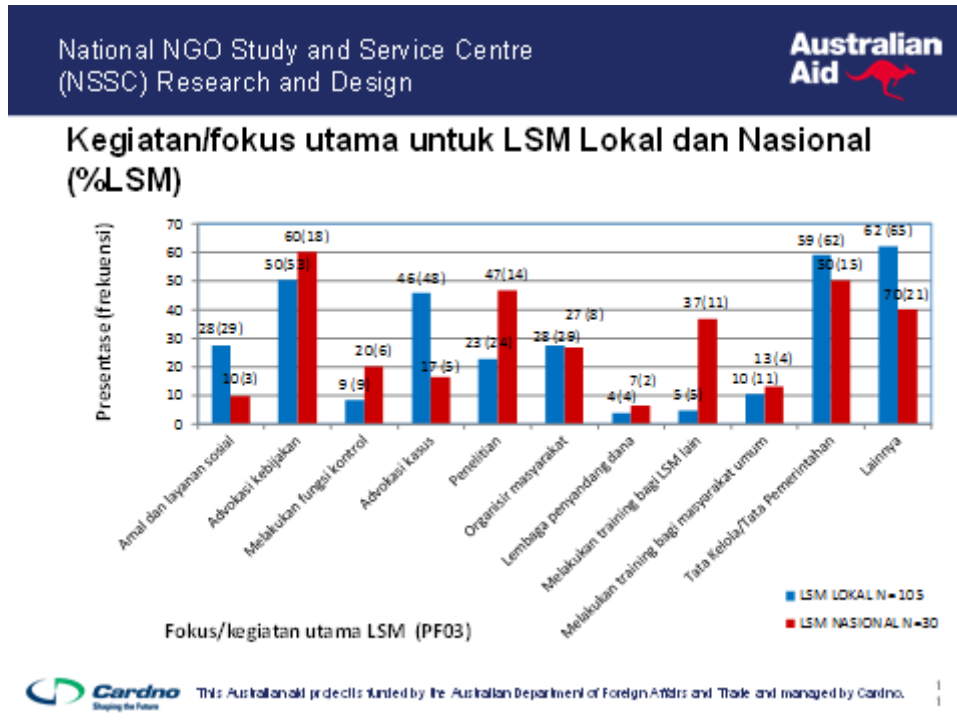
Catatan: jumlah sampel untuk LSM nasional kecil, meskipun disarankan untuk tidak menggunakan persentase (%) namun ditampilkan dalam diagram berikut

- Advokasi kebijakan – LSM lokal (setengah) dan nasional, namun secara signifikan lebih banyak LSM nasional (60%)
- Tata kelola/ tata pemerintahan – LSM lokal dan nasional, hasil serupa dengan jumlah setengah atau lebih dari setengah
- Advokasi kasus – lokal, hampir setengah; secara signifikan kurang untuk LSM nasional (17%);
- Layanan Sosial – hanya untuk lokal, lebih dari seperempat
- Penelitian - sebagian besar LSM nasional, hampir setengah
- Melakukan training bagi LSM lainnya – hanya nasional, lebih dari 1/3

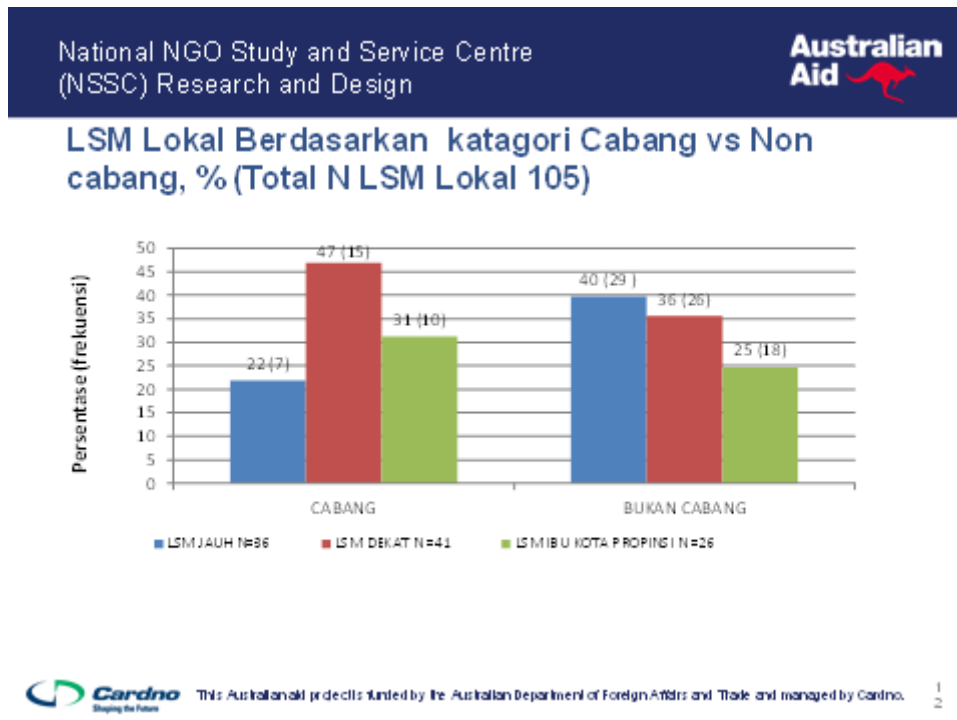
Note: Catatan untuk semua slide mulai slide ini. Signikan artinya signifikan secara statistik; Juga karena sampel (responden) NGO nasional kecil; maka frekuensi sebaiknya dipakai daripada persentase di chart di bawah.

Cardno
Shaping the Future

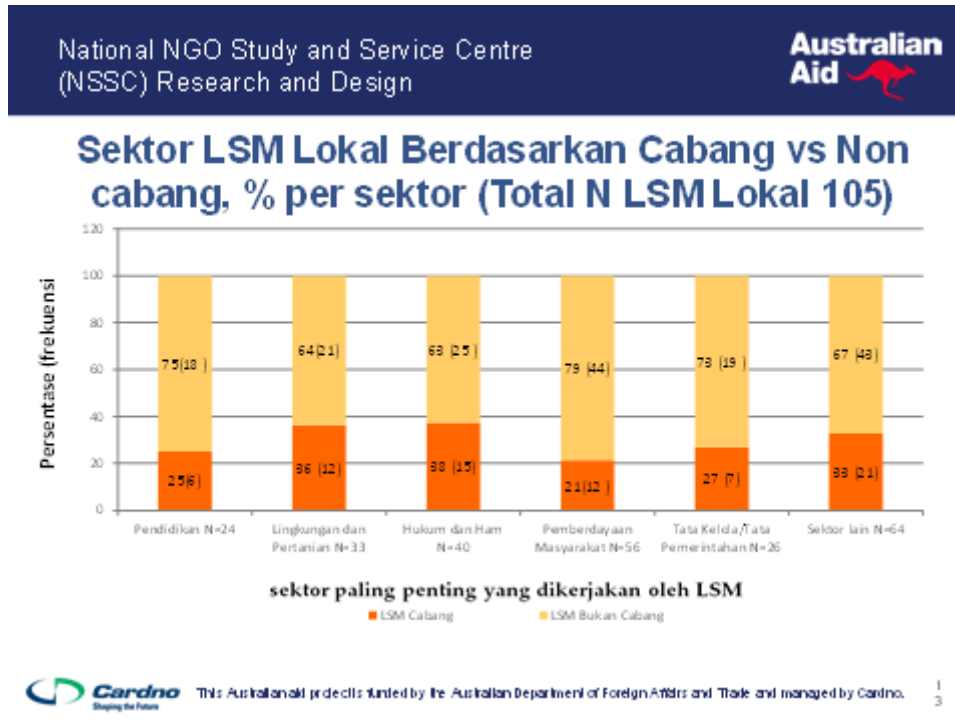
Slide 11



Slide 12



Slide 13



Slide 14

National NGO Study and Service Centre (NSSC) Research and Design **Australian Aid**

Sektor LSM Lokal Berdasarkan Cabang vs Non cabang: Poin kunci

Mengingat bahwa ketiga sektor terbesar untuk LSM lokal adalah Pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM, dan Lingkungan, untuk kedua sektor terakhir, LSM yang secara signifikan berfokus pada kedua sektor ini cenderung adalah LSM cabang. Hal ini (ditambah dengan kondisi lokal) mungkin menjelaskan mengapa ada lebih banyak lembaga yang cenderung berfokus pada kedua sektor ini ketimbang sektor lainnya. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tidak ada hubungannya dengan status LSM cabang.

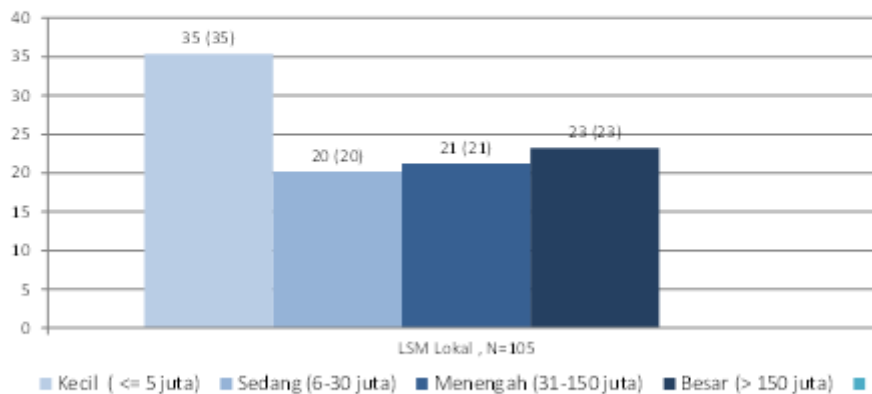
Cardno Shaping the Future This AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno. 1/4

Slide 15

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



LSM Lokal Berdasarkan ukuran dana, % (frekuensi)



This AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

1
5

Slide 16

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



LSM lokal berdasarkan ukuran dana: Poin kunci

- Di tingkat lokal, ada banyak lembaga-lembaga kecil dalam sampel dengan anggaran <Rp. 5 juta pada tahun 2013 dibandingkan dengan kategori lainnya, dimana ada sejumlah lembaga yang memiliki anggaran <Rp 1.5 juta.
- Meskipun demikian, ada banyak variasi dalam anggaran, dimana ada seperempat dari sampel memiliki anggaran >Rp 150 juta dibandingkan dengan 1/3 jumlah lembaga yang memiliki anggaran <Rp 5 juta.



This AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

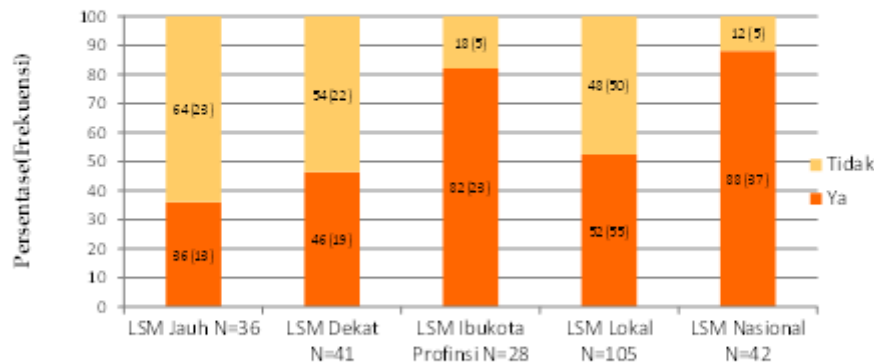
1
6

Slide 17

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



% LSM Berbadan Hukum



LSM berbadan hukum, atau tidak (PL02)



This AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

1

Slide 18

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



% LSM berbadan hukum: Poin kunci

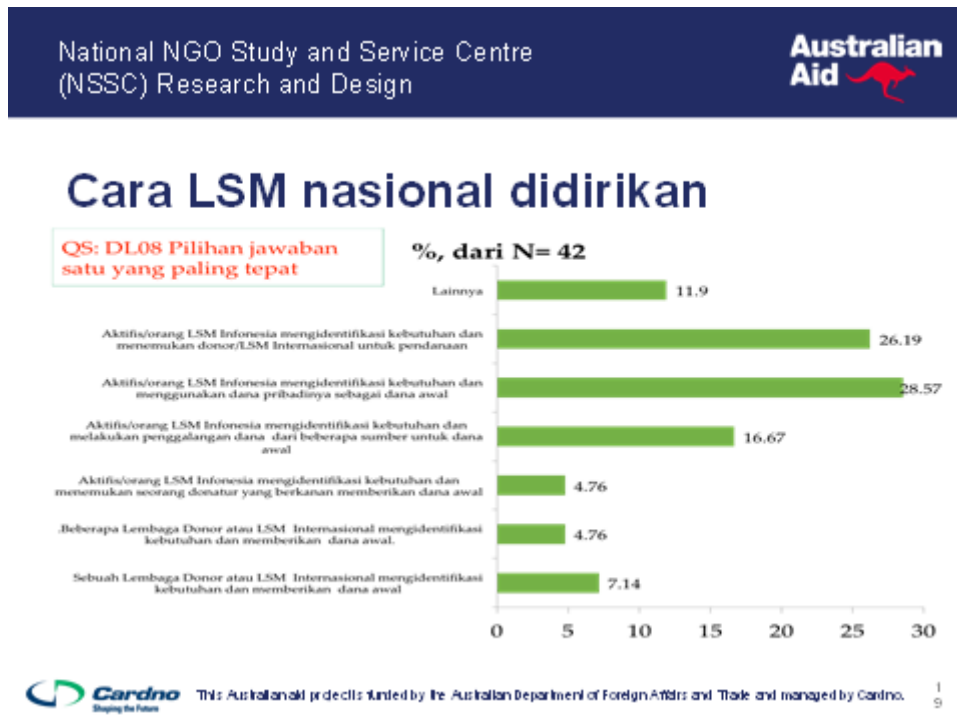
- Di tingkat lokal, makin dekat suatu lembaga dengan pusat kota, makin mungkin lembaga tersebut 'berbadan hukum', dan tingkat kemungkinannya hampir dua kali lipat bahwa LSM nasional adalah 'berbadan hukum', dibandingkan LSM lokal
- Sebagian besar LSM lokal menyatakan bahwa mereka memiliki visi dan misi, yang didukung dengan bukti foto dan fotokopi dokumen tersebut saat melakukan survei.
Tindak lanjut – telaah lebih lanjut apakah visi dan misi tersebut telah dioperasionalkan




This AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

1

Slide 19




Slide 20

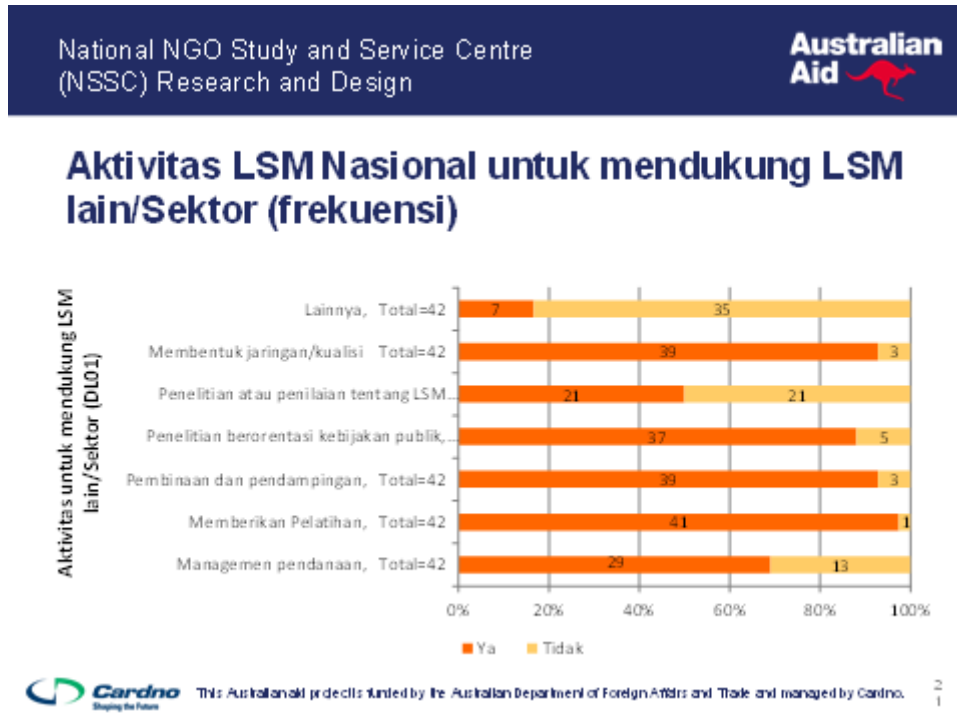
National NGO Study and Service Centre (NSSC) Research and Design **Australian Aid** 

Cara LSM nasional didirikan: Poin kunci

- Ada lebih lembaga di tingkat nasional lebih mungkin didirikan oleh aktivis/staf LSM yang mengidentifikasi kebutuhan (dibandingkan pemangku kepentingan lainnya yang mengidentifikasi kebutuhan tersebut), dan sumber utama dana berasal dari kantong sendiri, pihak donor, ataupun dari berbagai sumber.


 The Australian aid projects funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno. 2/9

Slide 21



Slide 22

- National NGO Study and Service Centre (NSSC) Research and Design **Australian Aid**
- ### Aktivitas LSM Nasional untuk mendukung LSM lain/Sektor: Poin kunci
- lebih dari 90% - membentuk koalisi, pembinaan dan pendampingan, memberikan pelatihan;
 - hampir 90% - penelitian berorientasi kebijakan publik
- Cardno Shaping the Future This AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno. 2/2

Slide 23

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



PERANAN DAN PERSEPSI



This AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

3/12

Slide 24

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Peranan dan persepsi

- Data kuantitatif jelas-jelas menunjukkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat adalah fokus sektoral kunci bagi LSM di Indonesia. Hal ini juga didukung oleh penelitian kualitatif, namun hingga titik tertentu ini bukanlah tren yang baru.
- Secara umum, berdasarkan FGD di 4 propinsi, para pemangku kepentingan (khususnya dari pihak pemerintah dan pihak swasta) memiliki pandangan yang positif terhadap LSM; meskipun pihak swasta cenderung kurang paham tentang kerja LSM atau bagaimana berhubungan dengan LSM
- Ada sejumlah persepsi negatif mengenai beberapa LSM, khususnya dari pihak pemerintah dan pihak swasta, mengenai LSM tertentu yang tidak memiliki tujuan yang jelas atau basis keanggotaan yang jelas. Ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa lembaga-lembaga tersebut mungkin berhubungan dengan 'kepentingan' di daerah dan dianggap sebagai pembuat onar – poin penting untuk akuntabilitas LSM.



This AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

2/4

Slide 25

National NGO Study and Service Centre (NSSC) Research and Design



INTERAKSI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN



This AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

01/10

Slide 26

National NGO Study and Service Centre (NSSC) Research and Design



Konteks ekonomi politik dan relasi personal

Konteks Ekonomi dan Politik dan Relasi Personal	Jawa Timur	Jambi	Sumatera Barat	Sulawesi Tengah
Konteks Ekonomi Politik	Faktor sosial-politik di Surabaya karena adanya pemerintah yang berasal dari kalangan politik, kooperasi tertentu berpengaruh pada interaksi LSM dan kadukatan sebagai LSM dengan pemerintah daerah. Di Kediri, pemerintah berdasarkan seluruh isi keluarga berpengaruh pada bagaimana LSM berinteraksi dengan pemerintah. Di kabupa daerah ini, jaringan patronase juga sangat kuat.	Faktor ekonomi yaitu kekayaan alam dan isu kelangkaan lingkungan dan hutan berpengaruh pada bagaimana LSM berinteraksi dengan pemerintah dan swasta, faktor ekonomi ini juga berpengaruh pada adanya jaringan patronase dan relasi personal yang kuat di LSM dan dalam interaksi mereka dengan pihak lain.	Situasi bencana berpengaruh mendorong interaksi yang lebih aktif antara LSM dan pemerintah, di sisi lain, faktor ekonomi daerah berpengaruh pada interaksi LSM dengan pihak lain dan kuatnya relasi personal dan jaringan patronase.	Faktor kekayaan alam dan kelangkaan lingkungan berpengaruh pada bagaimana LSM di Sulawesi berinteraksi dengan pemerintah dan swasta, termasuk dalam membangun jaringan patronase dan relasi personal.
Relasi personal	Ada kedekatan personal antara pimpinan kooperasi dan swasta, berimplikasi pada kedekatan antara LSM yang berkolaborasi dengan org. kooperasi tertentu dengan pemerintah yang berlatar belakang org. kooperasi yang sama.	Ada kedekatan antara LSM yang berkolaborasi dengan kooperasi dan pemerintah dengan pihak pemerintah setempat. Ada kedekatan antara LSM lingkungan dan pemerintah (Dinas Kehutanan).	Kedekatan antara LSM yang berkolaborasi dengan pemerintah dengan pihak pemerintah yang membangun jaringan patronase.	Ada kedekatan antara LSM yang berkolaborasi dengan pihak lain dengan Dinas Kehutanan, jaringan LSM yang fokus pada isu seni dan budaya dengan Dinas Pariwisata.



This AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

01/10

Slide 27

National NGO Study and Service Centre (NSSC) Research and Design



Temuan kunci: Interaksi LSM lokal dan nasional dengan pemangku kepentingan lainnya.

Catatan: Masing-masing LSM ditanya apakah mereka berinteraksi dengan tiap pemangku kepentingan, satu demi satu. Diagram pada beberapa slide berikut ini menunjukkan jawaban Ya/Tidak untuk tiap pemangku kepentingan.

Temuan:

- ✦Sebagian besar lembaga lokal dan nasional berinteraksi dengan perorangan dan pihak pemerintah, dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya
- ✦Ada banyak lembaga lokal dan nasional yang juga berinteraksi dengan anggota dewan (lebih signifikan bagi LSM nasional) – ini merupakan temuan yang cukup penting bagi tim
- ✦Namun interaksi di tingkat lokal hanya terbatas pada jenis pemangku kepentingan lainnya
- ✦Hanya 1/3 dari lembaga lokal berinteraksi dengan pihak donor dan pihak swasta (lebih signifikan bagi lembaga nasional, yakni masing-masing >90% dan 70%.
- ✦Kurang dari 2/3 dari lembaga lokal berinteraksi dengan koalisi dan LSM nasional.

Catatan: Hampaknya ada kesenjangan antara kegiatan-kegiatan yang dinyatakan oleh lembaga nasional terkait dukungan kepada LSM lainnya dengan kemungkinan adanya interaksi antara LSM lokal dan nasional

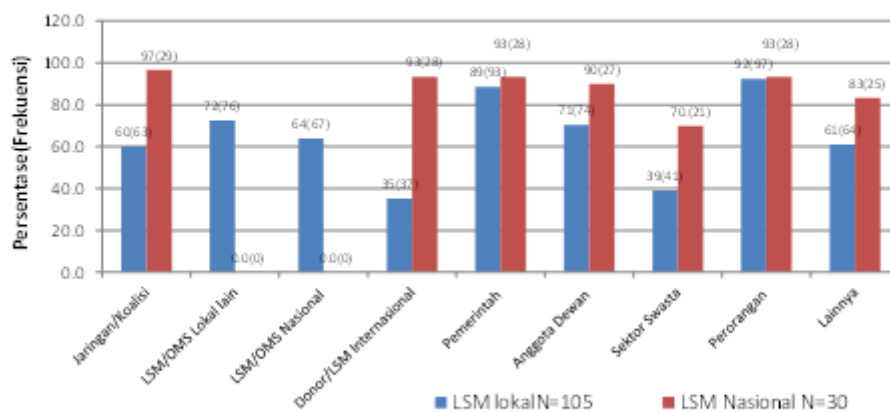


Slide 28

National NGO Study and Service Centre (NSSC) Research and Design



Interaksi LSM Lokal dan Nasional dengan Pemangku Kepentingan (% Jawaban Ya)



Interaksi LSM dengan pemangku kepentingan (AR01)



Slide 29

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Temuan kunci: variasi lokal dalam kemungkinan adanya interaksi dengan pemangku kepentingan

- Secara umum, pola yang terjadi di semua pemangku kepentingan ialah bahwa makin dekat basis lembaga dengan pusat kota, makin besar kemungkinan adanya interaksi antara LSM dan pemangku kepentingan lainnya.
- Secara umum, LSM yang mempunyai kantor di propinsi lebih besar kemungkinan berinteraksi dengan pemangku kepentingan, dibandingkan dengan LSM yang berlokasi di kabupaten (meskipun tidak ada variasi interaksi dengan perorangan, pihak swasta dan anggota dewan).
- Terdapat beberapa perbedaan signifikan pada kabupaten dekat dan jauh, dan tingkat kemungkinan untuk interaksi. Pengecualian: LSM yang berlokasi jauh dari ibukota propinsi kecil kemungkinannya untuk berinteraksi dengan
 - pihak donor (1/5 jauh) dibandingkan dengan hampir 1/3 LSM dekat
 - LSM nasional (kurang dari setengah untuk LSM 'jauh' dibandingkan dengan hampir 2/3 LSM 'dekat')

Catatan: Singkatnya, pada LSM di tingkat lokal, kemungkinan interaksi dengan pemangku kepentingan yang paling sulit dijangkau (pihak swasta, donor, dan dalam beberapa kasus, LSM nasional) paling nyata tercemrin pada LSM yang berlokasi jauh dari ibukota propinsi.

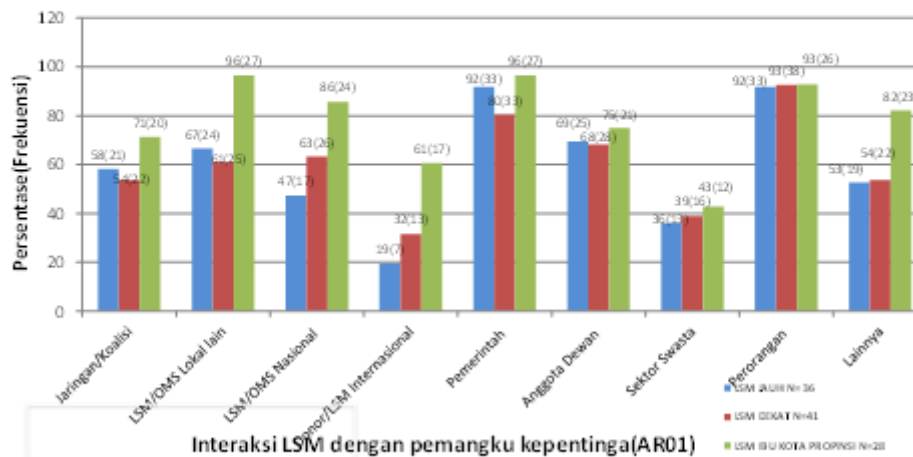


Slide 30

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



**Interaksi LSM Lokal dengan Pemangku
Kepentingan Berdasarkan Wilayah (% Jawaban Ya)**



Slide 31

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Temuan kunci - Interaksi

- Temuan: dalam slide berikut ini terlihat dengan jelas bahwa meskipun LSM berinteraksi dengan para pemangku kepentingan kunci, kemungkinan hanya terjadi 1-4 kali dalam kurun waktu 3 tahun, atau sekitar setahun sekali.
- Interaksi terjadi lebih sering dengan perorangan dan anggota dewan (kedua pemangku kepentingan yang juga cenderung berinteraksi dengan LSM), dimana ada jumlah LSM yang cukup banyak yang melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan ini lebih dari 10 kali.
- Meskipun ada jumlah interaksi yang cukup banyak dengan LSM lokal lainnya, angka ini hanya 1-4 kali selama 3 tahun bagi setengah lembaga sampel (mengingat bahwa sebagian besar sampel adalah lembaga kecil, yakni 1/3, yang dapat saling berhubungan)



Slide 32

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Temuan kunci - Interaksi

- Di antara pemangku kepentingan yang kurang berinteraksi dengan LSM (pihak donor dan pihak swasta), lebih dari ¾ jumlah LSM yang berinteraksi, frekuensi interaksi ini hanya berkisar antara 1-4 kali selama 3 tahun.
- Temuan ini serupa dengan interaksi antara LSM lokal dan LSM nasional/daerah serta koalisi, namun proposinya sedikit lebih tinggi bagi mereka yang melakukan interaksi lebih sering dengan pemangku kepentingan (yakni 1/5 dari LSM yang berinteraksi dengan koalisis atau LSM nasional/daerah melakukannya 5-10 kali selama 3 tahun, dan sekitar 10% melakukan pertemuan lebih dari 10 kali).



Slide 33

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Frekuensi interaksi juga penting

- Frekuensi terjadinya interaksi kemungkinan adalah faktor penting dalam membangun relasi dan menciptakan akses/kualitas relasi tersebut dengan pemangku kepentingan

Temuan: Interaksi lebih sering dengan para pemangku kepentingan

- Slide berikut ini menunjukkan bahwa bahkan ketika LSM berinteraksi dengan pemangku kepentingan kunci, hal ini cenderung terjadi hanya 1-4 kali dalam masa 3 tahun, atau sekitar setahun sekali.
- Interaksi lebih sering terjadi dengan perorangan dan anggota dewan (kedua jenis pemangku kepentingan yang juga lebih besar kemungkinannya berinteraksi dengan LSM), dimana ada jumlah LSM yang cukup banyak yang melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan ini lebih dari 10 kali.
- Meskipun ada jumlah interaksi yang cukup banyak dengan LSM lokal lainnya, angka ini hanya 1-4 kali selama 3 tahun bagi setengah lembaga sampel (mengingat bahwa sebagian besar sampel adalah lembaga kecil, yakni 1/3, yang dapat saling berhubungan



Slide 34

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design

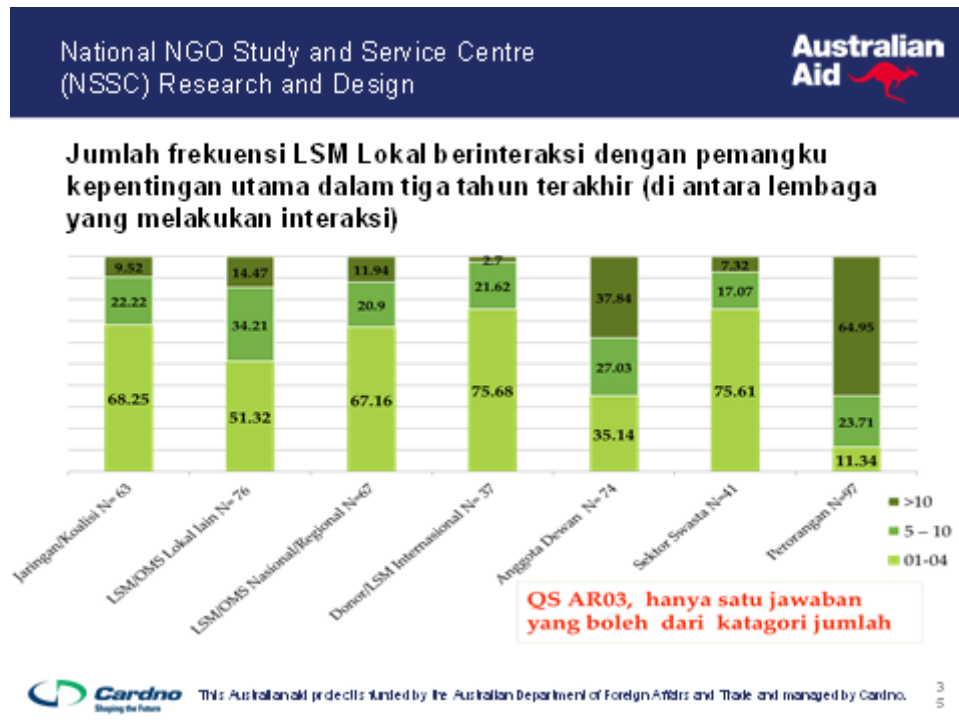


Interaksi yang kurang dengan pemangku kepentingan

- Di antara pemangku kepentingan yang kurang berinteraksi dengan LSM (pihak donor dan pihak swasta), lebih dari ¾ jumlah LSM yang berinteraksi, frekuensi interaksi ini hanya berkisar antara 1-4 kali selama 3 tahun.
- Temuan ini serupa dengan interaksi antara LSM lokal dan LSM nasional/daerah serta koalisi, namun proposinya sedikit lebih tinggi bagi mereka yang melakukan interaksi lebih sering dengan pemangku kepentingan (yakni 1/5 dari LSM yang berinteraksi dengan koalisi atau LSM nasional/daerah melakukannya 5-10 kali selama 3 tahun, dan sekitar 10% melakukan pertemuan lebih dari 10 kali).



Slide 35



Slide 36

National NGO Study and Service Centre (NSSC) Research and Design

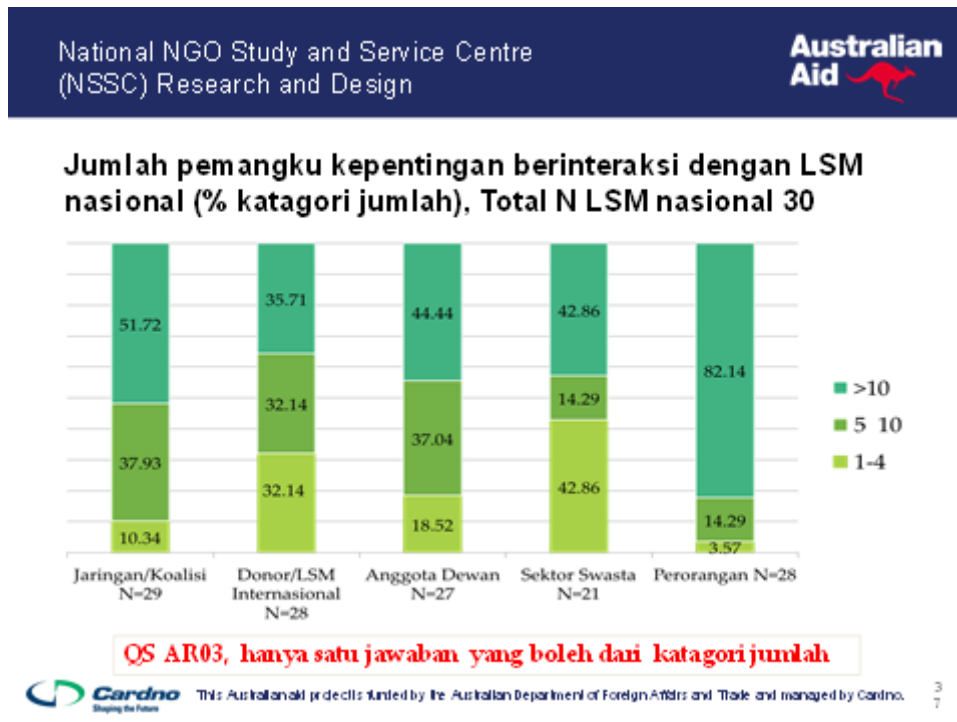
Australian Aid

Temuan: interaksi LSM nasional dengan pemangku kepentingan


- Mengingat bahwa sampel lembaga kecil, sebaiknya menggunakan ukuran frekuensi ketimbang persentase (%). Meskipun LSM nasional lebih mungkin berinteraksi dengan sebagian besar pemangku kepentingan dibandingkan LSM lokal, frekuensi interaksi tersebut lebih kecil dengan lembaga donor internasional dan pihak swasta.
- Sebaliknya, interaksi lebih sering terjadi dengan koalisi (secara signifikan berbeda dengan di tingkat lokal), dan sama halnya dengan LSM lokal dalam interaksinya dengan anggota dewan dan perorangan.

Cardno
Shaping the Future

Slide 37




Slide 38

National NGO Study and Service Centre (NSSC) Research and Design **Australian Aid** 

Pertanyaan terkait relasi dengan pemangku kepentingan

- Nasional > Dekat > Jauh.
 - Apakah ini terkait isu jarak (mungkin sebagian), kurangnya akses, atau kurangnya informasi?
- Frekuensi interaksi yang bervariasi
 - Apakah frekuensi interaksi mempengaruhi kualitas relasi?

 This AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno. 3/8

Slide 39

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Relasi dengan pemangku kepentingan

- Menurut data kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif, bentuk interaksi yang paling umum adalah 'berbagi informasi' dan 'kerja sama', dan jarang dalam bentuk Nota Kesepahaman dan kontrak (berdasarkan dana)
- Riset kualitatif: relasi antara pemangku kepentingan cenderung bergantung pada hubungan pribadi, ketimbang relasi kelembagaan
- Bentuk interaksi yang lebih formal antara lembaga, seperti kontrak atau nota kesepahaman lebih umum dijumpai di tingkat nasional, dan relasi semacam ini tidak dijumpai dalam hasil survei atau penelitian kualitatif



This AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

3

Slide 40

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Relasi dgn pemangku kepentingan

- Kerjasama yang lemah dengan pihak swasta (lebih bagus di lokasi yang terdapat basis industri; lebih bagus secara signifikan di tingkat nasional)
- Alasan utama untuk tidak berinteraksi dengan pemangku kepentingan (baik penelitian kualitatif dan kuantitatif)
 - Faktor nilai dan etika.
 - Data yang ada harus dilihat kembali dan diperiksa dasar-dasar apa saja yang memang sudah kuat dalam mendasari hubungan ini
- Interaksi dengan pihak swasta seringkali didorong oleh
 - Inisiatif dari pihak CSR atau pegawai pemerintah, yang memiliki latar belakang LSM/ yayasan
- Interaksi antar pemangku kepentingan sangat tergantung pada konteks lokalnya dan hubungan pribadi.
 - Akses terbatas bagi beberapa LSM yang tidak termasuk dalam jaringan terkait, khususnya di daerah di mana ada keluarga atau pemimpin tertentu yang terkenal
- LSM lokal tidak banyak berinteraksi dengan pihak donor
- Pentingnya berinteraksi dengan perorangan juga ditangkap dalam data kualitatif



This AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

4

Slide 41

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Interaksi LSM lokal dengan jaringan, LSM Lokal lainnya dan LSM nasional

	Interaksi dengan Jaringan		
	Ya	Tidak	N
Interaksi dengan LSM Lokal lainnya			
Ya	61.84	38.16	76
Tidak	55.17	44.83	29
Interaksi dengan LSM nasional/regional			
Ya	65.67	34.33	67
Tidak	50.00	50.00	38

QS AR01, jawaban ya/tidak



42

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Interaksi LSM lokal dengan jaringan, LSM lokal lainnya dan LSM nasional: Poin kunci

- Berhubung LSM lokal kurang berinteraksi dengan koalisi, ada kekhawatiran bahwa mungkin LSM tidak dapat membedakan apakah mereka berinteraksi dengan koalisi atau LSM lokal lainnya.
- Namun, meskipun ada tumpang tindih antara LSM yang berinteraksi dengan keduanya, setengah atau hampir setengah menyatakan bahwa mereka tidak berinteraksi dengan keduanya. Juga nampaknya ada perbedaan antara kedua pemangku kepentingan berdasarkan jawaban yang diberikan



This AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

4

Slide 43

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Bentuk dukungan yang diberikan dan alasan untuk tidak berinteraksi

- Sebagian besar bentuk dukungan yang diberikan oleh pemangku utama kepada LSM lokal adalah dalam dukungan informasi/teknis dan pelatihan (lebih dari 50% LSM melaporkan bahwa inilah bentuk dukungan dari tiap pemangku kepentingan yang berinteraksi dengannya), diikuti oleh dukungan advokasi bersama (khususnya dengan pemerintah, LSM lokal lainnya, LSM nasional dan koalisi)
- Jika ada infrastruktur yang diberikan (hanya beberapa pemangku kepentingan yang memberikan), biasanya dari pemerintah (1/3 LSM yang berinteraksi dengan pemerintah melaporkan hal ini)
- Dana biasanya bentuk dukungan yang paling kecil kemungkinannya, dan jika diberikan biasanya dari pemerintah (1/4 LSM melaporkan hal ini), dan juga dari pihak swasta dan LSM nasional (sampel kecil)



This AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

4
3

Slide 44

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Bentuk dukungan yang diberikan dan alasan untuk tidak berinteraksi

Yang tidak berinteraksi dengan pemangku kepentingan

- Alasan etis dan kurangnya informasi merupakan alasan-alasan utama yang ditunjukkan oleh penelitian kualitatif dan survei
- Tidak banyak yang pernah berinteraksi dengan pemangku kepentingan mengalami pengalaman buruk
- Namun, menurut hasil survei alasan utama di balik kurangnya interaksi dengan koalisi adalah bahwa LSM berusaha berinteraksi, namun tidak mendapatkan respons – dinyatakan oleh setengah dari 42 LSM lokal yang tidak berinteraksi dengan koalisi.
- Ada sejumlah LSM yang tidak berminat (alasan utama dari setengah dari 64 lembaga yang menyatakan tidak berinteraksi dengan pihak swasta, dan bagi 1/3 dari 29 lembaga yang tidak berinteraksi dengan LSM lokal lainnya)
- Alasan lain yang dinyatakan oleh 2/3 dari 67 lembaga yang tidak berinteraksi dengan donor (kategori lainnya dalam survei harus diteliti lebih lanjut)
- Sektor mana saja? (untuk desain)




This AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

4
4


Slide 45

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Interaksi dengan Jaringan/ Koalisi/LSM lain/lembaga nasional

- Jelas bahwa ada relasi yang lemah antara LSM lokal dan nasional, maupun antara LSM lokal dengan koalisi
- Interaksi antar LSM lokal juga relatif rendah (contohnya hanya 50% lembaga berinteraksi, paling banyak 4 kali selama 3 tahun)
 - *Mungkin tidak mencerminkan interaksi informal antar individu?*
- Interaksi yang rendah mungkin mempengaruhi jumlah dana dari LSM nasional ke LSM lokal (khususnya yang berada di kabupaten jauh)
- Kurangnya respons dianggap sebagai alasan utama dari interaksi yang lemah dengan koalisi dan kurangnya minat berinteraksi dengan LSM lokal lainnya




Cardno
Shaping the Future

THIS AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

4
5

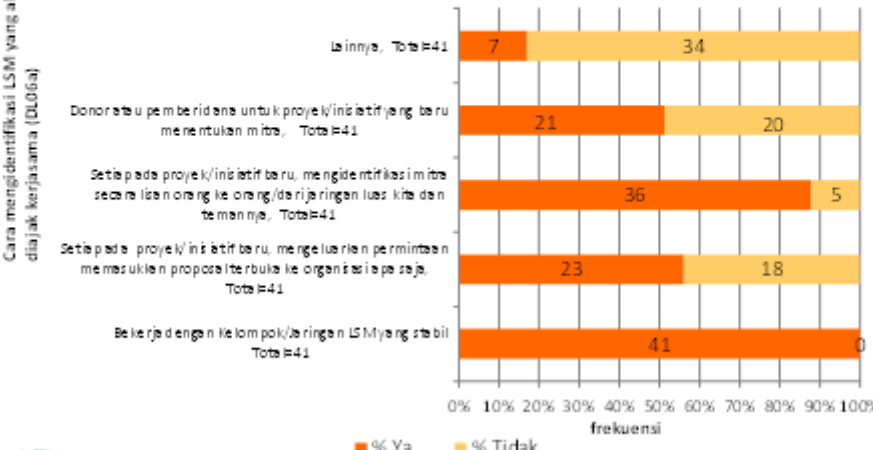
Slide 46

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design




Cara LSM Nasional Mengidentifikasi LSM Lain yang Akan Diajak Bekerja Sama (Jika Ada Kegiatan)

Cara mengidentifikasi LSM yang akan diajak kerjasama (DUG6a)



Cara mengidentifikasi LSM yang akan diajak kerjasama	% Ya	% Tidak
lainnya, Total=41	7	34
Donor atau pemberi dana untuk proyek/inisiatif yang baru menentukan mitra, Total=41	21	20
Setiap ada proyek/inisiatif baru, mengidentifikasi mitra secara lisan orang ke orang/dari jejaring luas kita dan teman-nya, Total=41	36	5
Setiap ada proyek/inisiatif baru, mengeluarkan permintaan memasukkan proposal terbuka ke organisasi-pekerja, Total=41	23	18
Bekerja dengan kelompok/jejaran LSM yang stabil, Total=41	41	0



Cardno
Shaping the Future

frekuensi

Slide 47

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Bekerja sama dengan mitra

- Untuk mengidentifikasi LSM lain yang akan diajak bekerja sama, LSM nasional cenderung bekerja dengan kelompok dan jaringan yang mapan (semua), dan jika ada proyek baru, mitra diidentifikasi lewat jaringan teman atau informasi personal (hampir 90%)
- Sekitar setengah LSM nasional pernah mengalami lembaga donor atau agen pemberi dana mengidentifikasi mitranya; dan setengah juga pernah mengalami membuka proposal untuk mencari mitra.



This Australian aid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.



Slide 48

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Jaringan/Koalisi/LSM lain

- Hal-hal umum yang mendorong kerja sama
 - Menurut penelitian kuantitatif dan kualitatif, LSM berinteraksi dengan lembaga lainnya untuk memberikan bantuan, seringkali karena nantinya mereka sendiri juga akan butuh bantuan dari LSM lain; penelitian kualitatif menunjukkan sedikit alasan di balik kerja sama untuk membentuk aliansi strategis guna mencapai tujuan-tujuan kelembagaan
 - Bentuk relasinya lebih diperjelas lagi seperti apa?
 - Apakah berjejaring karena punya isu yang sama (Bandingkan juga dengan temuan tim kuantitatif bahwa suatu LSM bekerja di sektor-sektor berbeda),
 - Jejaring karena merupakan cabang dari LSM nasional saja?; mungkin dapat dikelompokkan menjadi jaringan internal dan eksternal?
 - Bagaimana LSM-LSM yang bekerja di isu pemberdayaan (isu pemberdayaan sangat luas) berjejaringan dengan LSM lain (jenis jaringan, bagaimana berjejaringan?)?
 - *Ada beberapa contoh jejaring multi-isu yang kuat di tingkat daerah - perlu dipertimbangkan juga*



This Australian aid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.



Slide 49

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



AKAN TETAPI....

- Ada banyak pihak yang menginginkan relasi yang lebih baik lagi antara pemangku kepentingan, baik oleh mereka yang sudah membangun relasi maupun yang belum.
- Lebih dari 90% semua LSM nasional dan lokal menginginkan relasi yang lebih baik dengan tiap pemangku kepentingan
- Ketika ditanya secara khusus, apakah lembaga ingin memperluas jaringan mereka dengan LSM dan koalisi Indonesia, respons rata-rata adalah 4,63 (pada skala 1-5, skor 5 sangat setuju)
- Dan ketika ditanya secara khusus, apakah lembaga perlu memperluas jaringan dengan LSM dan koalisi internasional, respons rata-rata adalah 4,29 (pada skala 1-5, skor 5 sangat setuju)



This AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

4
9

Slide 50

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Keinginan LSM Mengubah Interaksi (semua LSM menjawab)

LSM Lokal (N=105)	Nasional (N=30)
Dengan Jaringan sudah puas: 10% ingin memperbaiki: 89%	Dengan Jaringan Sudah puas 7% Ingin perbaiki: 90% ingin mengurangi: 3%
Dengan LSM lokal sudah puas 4% ingin memperbaiki: 96%	
Dengan LSM nasional sudah puas: 4% ingin memperbaiki: 96%	
Dengan Pemerintah sudah puas: 5% ingin memperbaiki: 95%	Dengan Pemerintah sudah puas: 4% ingin memperbaiki: 92%
Dengan swasta sudah puas: 2% ingin memperbaiki: 95% ingin mengurangi: 3%	Dengan swasta sudah puas: 0% ingin memperbaiki :100%



This AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

5
0

Slide 51

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



AKUNTABILITAS & PROGRAM/ADVOKASI BERBASIS BUKTI



This Australian aid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

5
1

Slide 52

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Akuntabilitas – Audit dan Pengumuman Laporan Keuangan

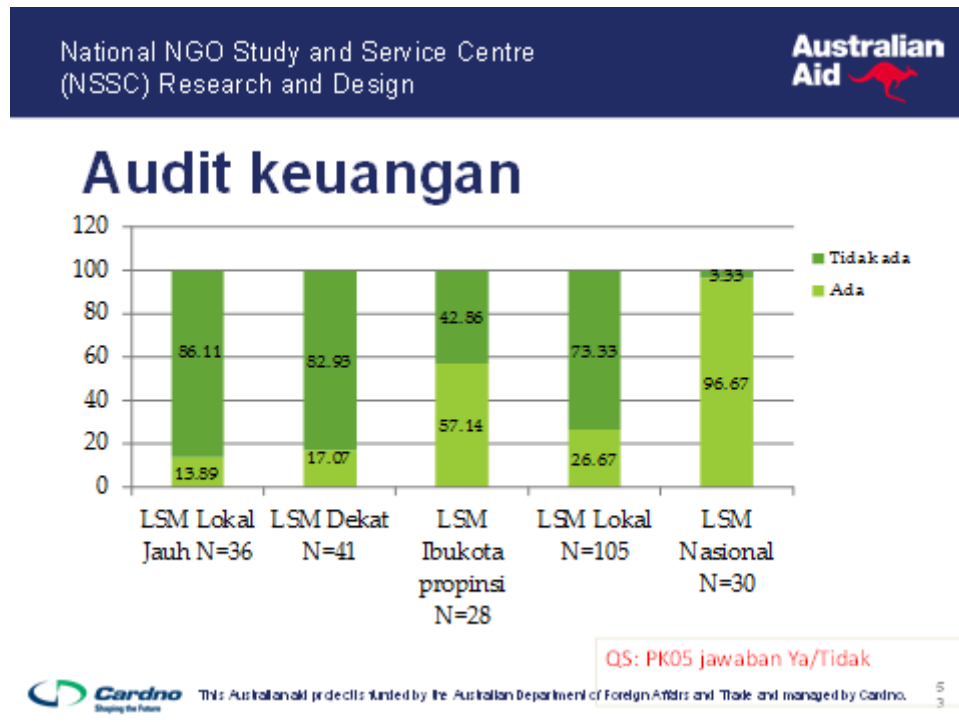
- Hampir semua LSM nasional yang disurvei melakukan audit (96%) dalam waktu 3 tahun terakhir
 - Sebagian besar audit dilakukan tiap tahun (90% dari 29 lembaga nasional)
 - 41% audit dilakukan berdasarkan inisiatif sendiri, ditambah 21% karena ada badan pengawas
- LSM lokal yang melaporkan telah melakukan audit dalam waktu 3 tahun terakhir secara signifikan lebih sedikit (1/4, atau 27%)
 - Di antara LSM lokal yang melakukan audit, alasan utama adalah karena persyaratan donor (54%), meskipun 21% melaporkan bahwa audit dilakukan karena inisiatif staf
- Sekitar 2/3 (dari 42) lembaga nasional melaporkan bahwa mereka mengumumkan laporan keuangannya kepada publik dalam 3 tahun terakhir. Dari sudut pandang akuntabilitas, angka ini rendah, namun secara signifikan lebih tinggi dari angka lembaga lokal (7% dari 105 lembaga)
- *Angka-angka di atas masih harus diteliti lebih lanjut menurut ukuran dana masing-masing lembaga maupun sumber daya dan hubungannya dengan pendanaan "swadaya" yang makin populer. (Secara umum, biaya melakukan audit juga cukup mahal)*
- *Tantangan dalam "mengukur akuntabilitas" – Ada ide lain untuk menentukan ukuran akuntabilitas alternatif, khususnya untuk akuntabilitas ke bawah (downward accountability)?*



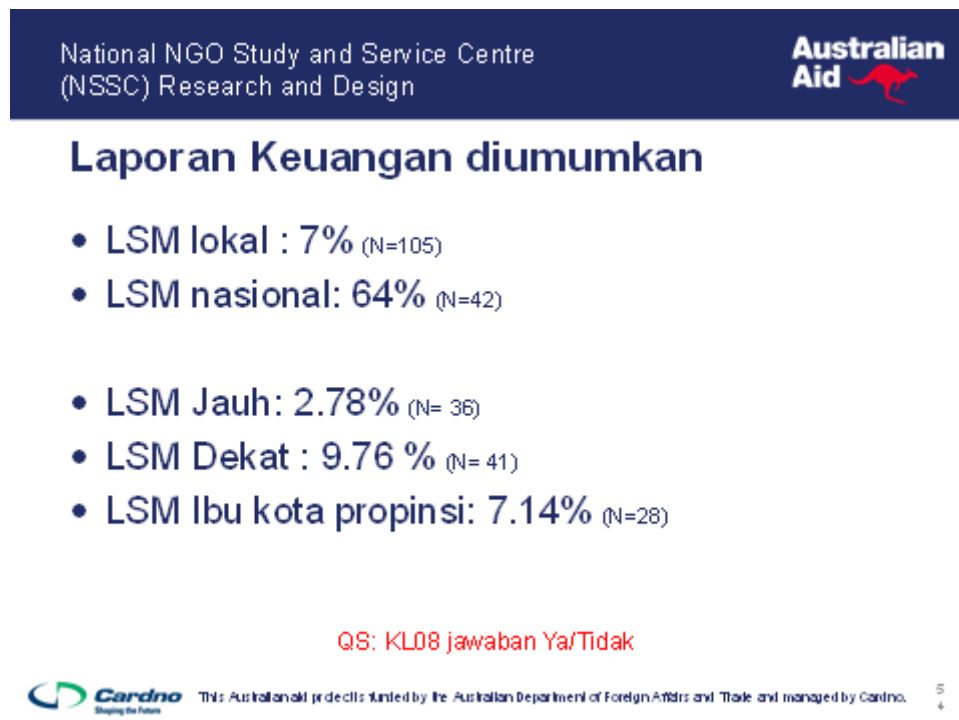
This Australian aid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

5
2

Slide 53



Slide 54



Slide 55

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Akuntabilitas & Program/Advokasi Berbasis Bukti

- Sebagian besar lembaga lokal dan nasional melaporkan bahwa mereka mempunyai suatu mekanisme/cara untuk mengumpulkan informasi untuk melacak kemajuan dan keluaran-keluaran di tingkat proyek maupun lembaga
 - 97% dari 105 lembaga lokal dan 100% dari 30 lembaga nasional
 - tapi perlu ditelaah lebih lanjut apa saja mekanisme ini dan bagaimana digunakan
- Sejumlah lembaga, dan hanya lembaga lokal, melaporkan bahwa mereka tidak mempunyai mekanisme semacam ini (3%)
- Di antara lembaga yang mengumpulkan informasi mengenai tingkat kemajuan/keluaran (lokal dan nasional)
 - Hanya 38% dari lokal dan 60% (13 dari 22) lembaga nasional melaporkan bahwa laporan keuangan mereka diumumkan secara publik. (Sama halnya dengan angka mengenai audit, hal ini harus dicek ulang dengan besaran anggaran dan sumber dana lembaga)
 - Masing-masing 61% dan 62% melaporkan bahwa mereka menggunakan mekanisme itu untuk mengetahui apa saja yang berjalan dengan baik dan kurang baik
 - Masing-masing 51% dan 60% menganggapnya sebagai bagian dari perencanaan tahunan dan jangka panjang



This Australian aid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

01/01

Slide 56

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



PENDANAAN



This Australian aid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

01/01

Slide 57

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Besarnya dana LSM di tahun 2013 dalam Rp

	Jauh	Dekat	Ibu Kota propinsi	LSM Lokal	LSM nasional
Minimum	0	0	0	0	0
25% percentile	2 juta	0	60 juta	1.8 juta	1.5 milyar
Median	11 juta	2.5 juta	500 juta	20 juta	2 milyar
75% percentile	50 juta	36 juta	1 milyar	150 juta	6.8 milyar
Maksimum	1 milyar	1 milyar	10 milyar	10 milyar	200 milyar
Mean	73 juta	70 juta	1.1 milyar	340 juta	15.5 milyar
N	36	41	28	105	42

QS KL03, jawaban numerik



This AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

57

Slide 58

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Temuan – Pendapatan NGO

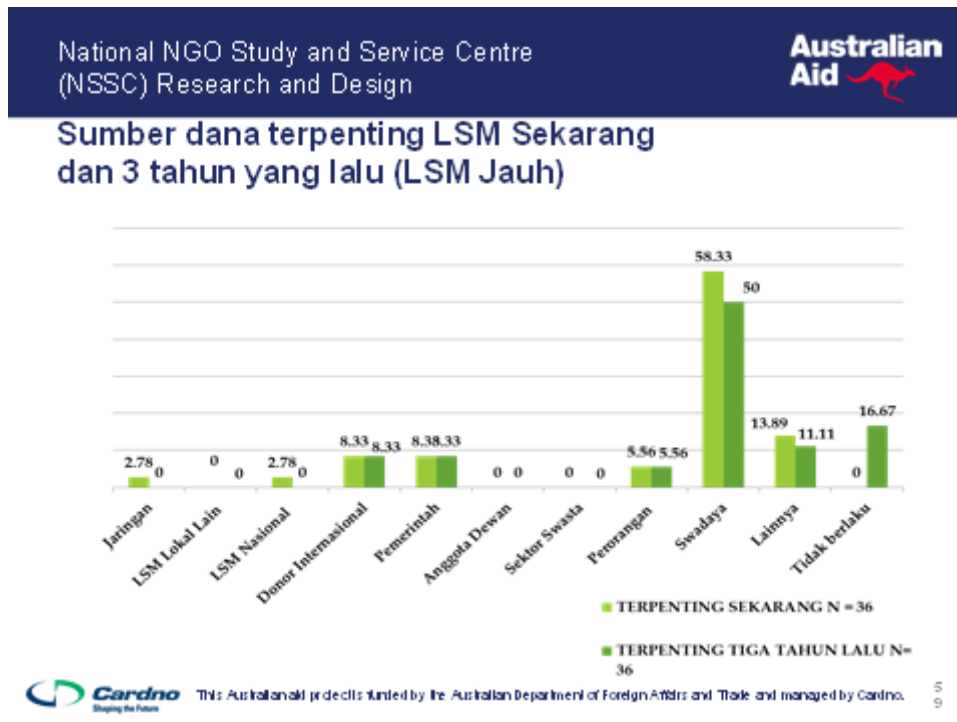
- Uang sangat terkonsentrasi di lembaga nasional dan di beberapa lembaga propinsi, dan di tiap tingkatan terkonsentrasi hanya di sejumlah kecil lembaga (terlihat dari perbedaan yang besar antara mean dan median). (Lembaga propinsi dan dekat/jauh perlu ditelaah untuk lembaga cabang).
- Juga perlu mencek silang antara anggaran dan tipe kegiatan yang dilakukan, jenis-jenis realsi, dan sumber dana (khususnya "swadaya"). Lembaga yang memiliki anggaran nol perlu diteliti lebih lanjut (khususnya di tingkat nasional) – dan lakukan analisis lebih lanjut dengan menghilangkan 'nol', mungkin menampilkan hasil yang menarik.
- Mohon juga dicatat bahwa dalam sampel lembaga 'dekat', ada banyak lembaga yang tidak mempunyai anggaran, dan lebih banyak (median) yang memiliki anggaran kecil – angka anggaran tersebar di beberapa kuartil di lokasi yang jauh



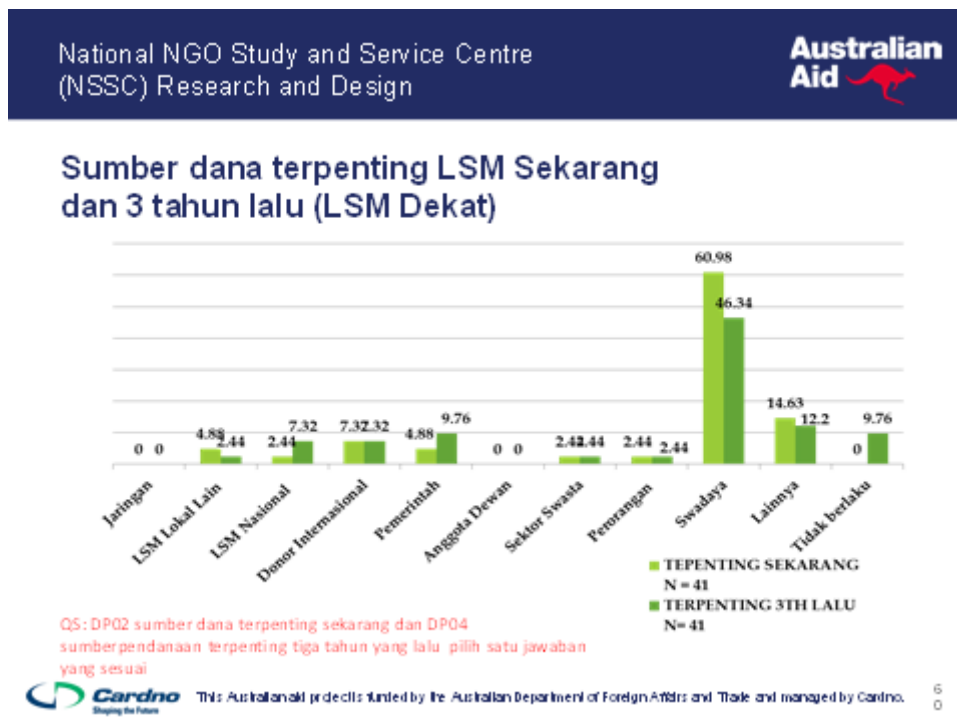
This AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

58

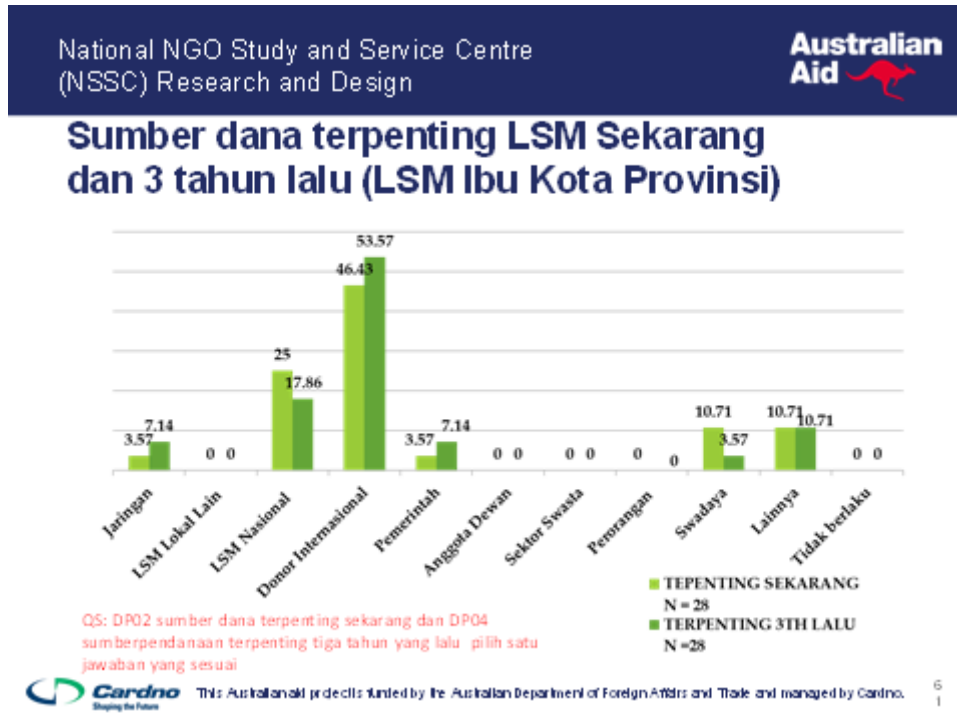
Slide 59



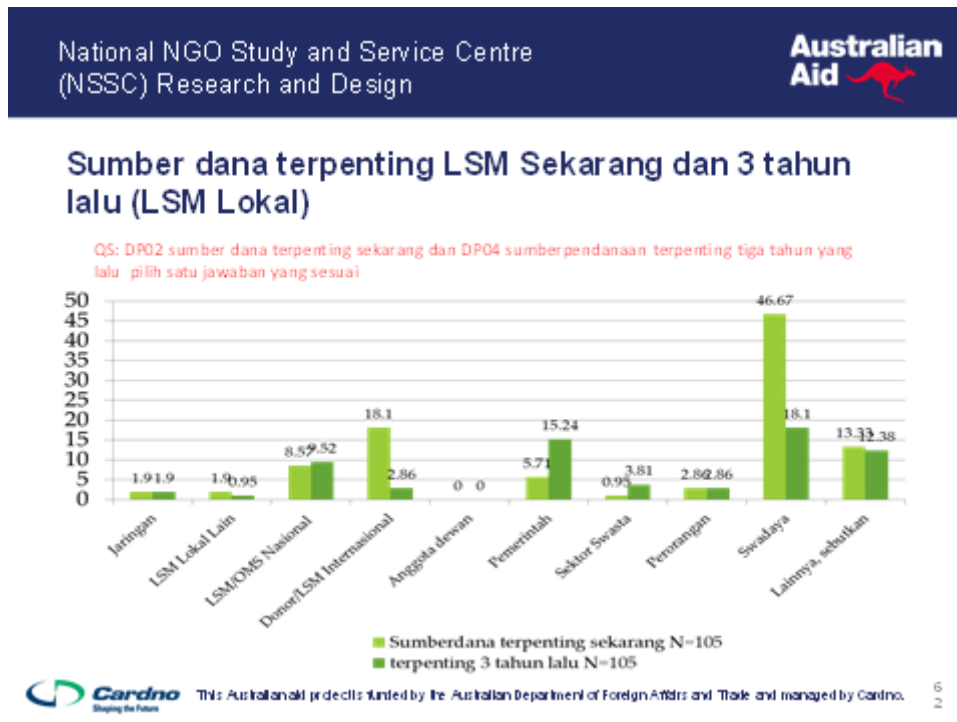
Slide 60



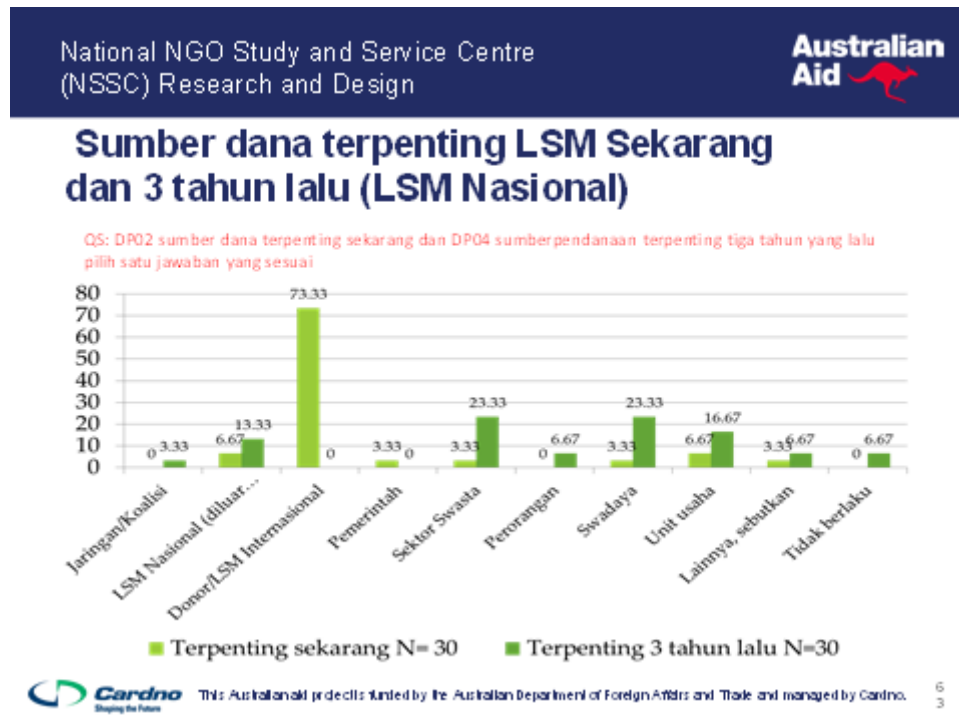
Slide 61



Slide 62



Slide 63



Slide 64

National NGO Study and Service Centre (NSSC) Research and Design

Australian Aid

Pendanaan

- **Ada perbedaan signifikan dalam median anggaran antara LSM dekat dan jauh**
 - Kabupaten yang dekat dengan ibukota propinsi, tapi tidak termasuk dalam sampel, mempunyai banyak LSM yang tidak memiliki anggaran, dan lebih banyak (median) yang memiliki anggaran kecil angka anggaran tersebar di beberapa kuartil di lokasi yang jauh
 - Perlu dibagi menurut besaran, daerah, jenis kegiatan, cakupan kegiatan dst
- Ketergantungan pendanaan swadaya pada LSM lokal.
 - Nuansa belum jelas; skala perubahan lebih besar di LSM jauh

Cardno Shipping the Future. This Australian aid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

Slide 65

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Pendanaan

- Secara signifikan ada lebih banyak LSM nasional yang memperoleh dana dari lembaga donor dibandingkan LSM lokal (dan sebagian kecil mendapatkan dana dari LSM nasional)
 - Apa yang menjadi penyebabnya?.. Bagaimana LSM nasional menggunakan dana tersebut?
- Ada dukungan dari swasta yang cukup baik (kepada LSM lokal), tapi skala kecil (hanya 1 atau 2 LSM). Namun tidak sebesar LSM nasional
- Tidak ada informasi mengenai pihak swasta yang berhubungan dengan LSM (baik nasional maupun lokal)



This Australian aid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

5
6

Slide 66

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Pendanaan

- Dana pemerintah cenderung digunakan untuk membiayai acara atau kegiatan bersama
 - Beberapa ada yang berupa hibah atau program
 - Harus dicek ulang jenis-jenis LSM yang bersedia atau tidak bersedia menerima dana pemerintah
 - Apakah terkait etika dan/atau karena tidak ada pilihan lainnya?
- Ada beberapa tantangan untuk mengakses dana ini, seperti potongan biaya, kerumitan prosedur, kesesuaian alokasi dana pemerintah dengan kegiatan LSM
- *Kebutuhan untuk menggalang dana publik perlu diteliti lebih lanjut, maupun kesenjangan informasi dari pelaku-pelaku lainnya*
 - *Laporan hasil penelitian kualitatif membahas isu kesenjangan informasi*



This Australian aid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

5
6

Slide 67

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



SDM & REGENERASI KEPIMIMPINAN



This AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

6
7

Slide 68

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



SDM – Profil

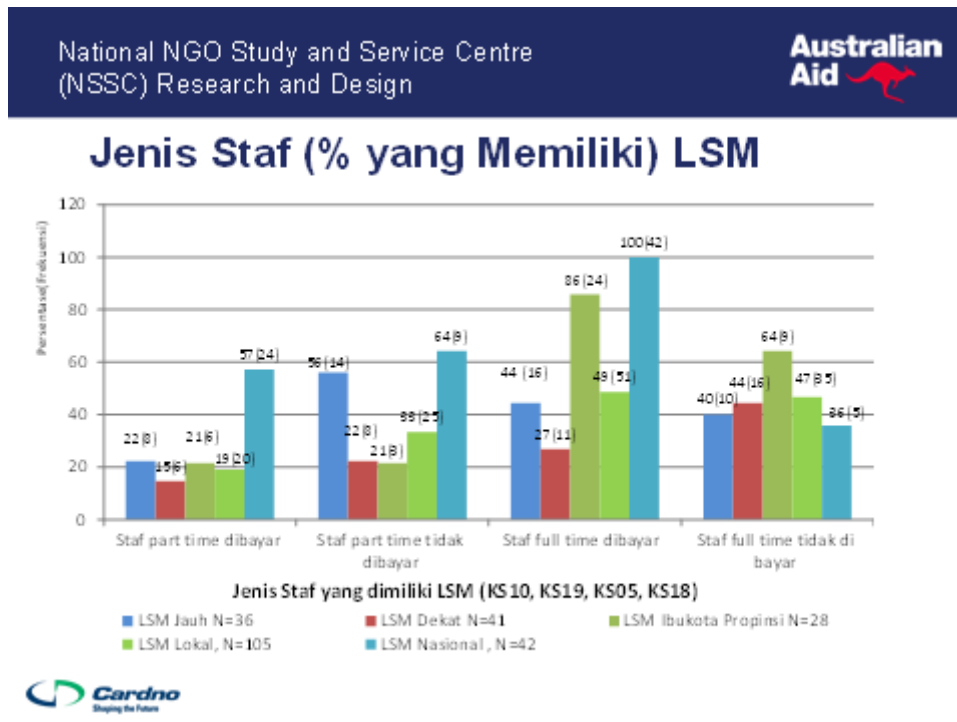
- Meskipun sampel kecil, lembaga nasional lebih mungkin memiliki staf (baik yang dibayar maupun tidak) dan memiliki variasi jenis staf – staf dibayar part time 58%, sedangkan LSM lokal 20%. Apakah ukuran LSM nya mempengaruhi hal itu?
- 100% (n=42) LSM nasional memiliki setidaknya satu staf full time
- LSM di tiap tingkatan memiliki staf full time tidak dibayar
- LSM jauh lebih mungkin memiliki staf part time tidak dibayar dibandingkan dengan semua jenis letak geografis
- Jika memiliki staf part time yang digaji maupun tidak, lembaga lokal dekat ibukota lebih mungkin memiliki jumlah staf yang lebih besar (dibandingkan LSM jauh), tapi rasionya hampir sama dengan staf full time dibayar antara LSM dekat dan jauh
- Ada sedikit jumlah direktur dan wakil direktur perempuan, namun sedikit lebih banyak direktur di tingkat nasional dibandingkan di tingkat lokal
- Terkait LSM yang memiliki staf full time perempuan, sebagian besar sampel LSM (baik dekat maupun jauh) memiliki antara 10-25% staf perempuan, atau atau 25-50% staf perempuan (hampir 60% dari semua sampel lokal); rasionya lebih besar untuk sebagian besar LSM propinsi dan nasional, namun angkanya rendah.
- LSM kabupaten jauh lebih mungkin tidak memiliki staf full time perempuan yang dibayar



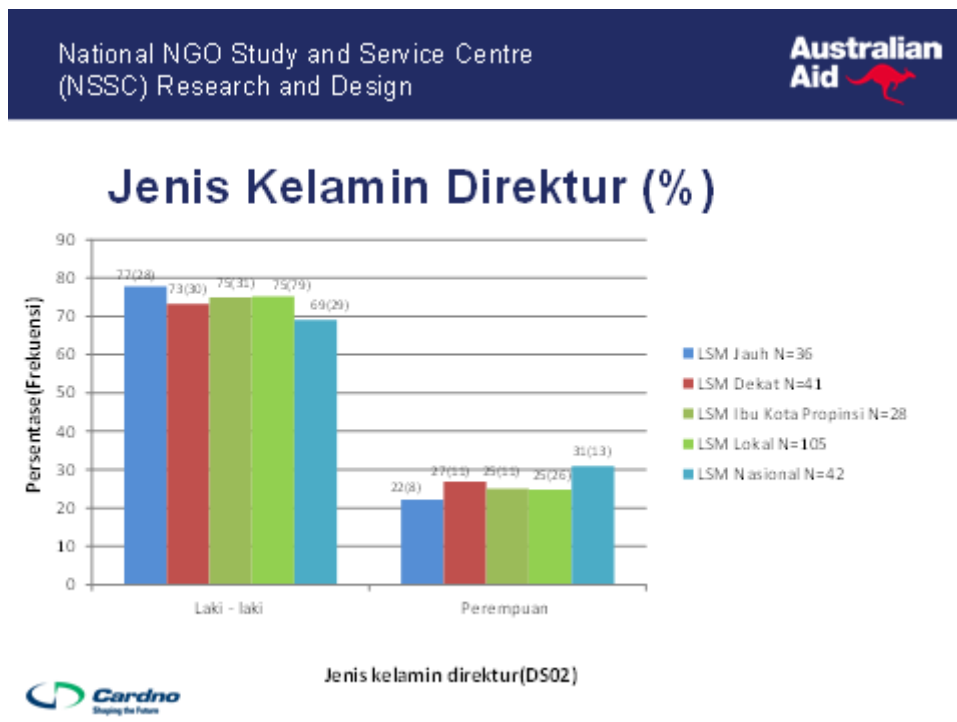
This AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

6
8

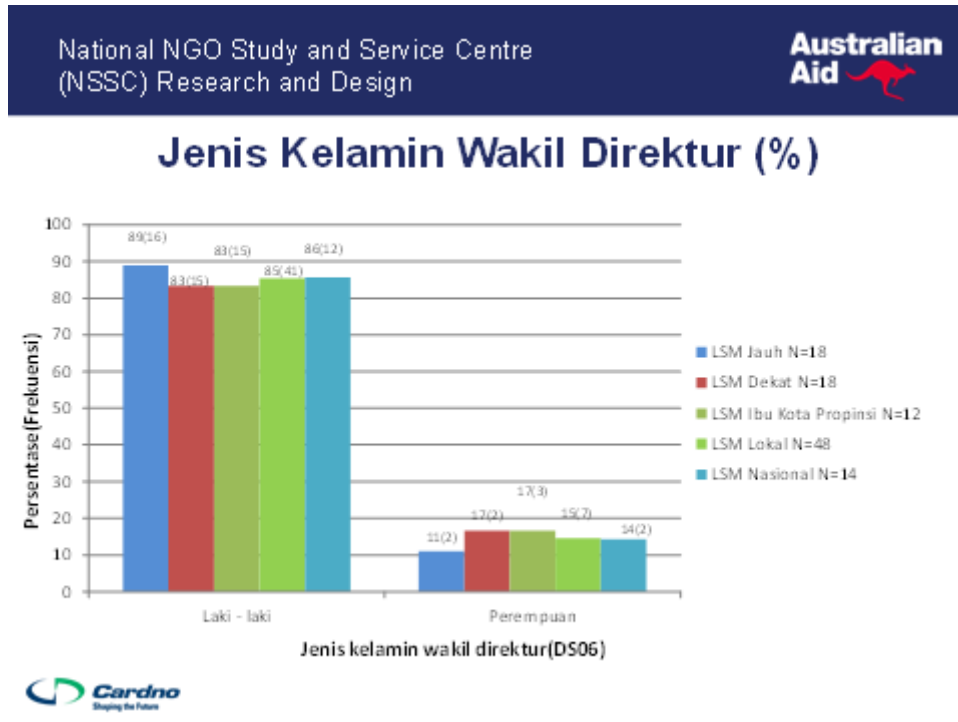
Slide 69



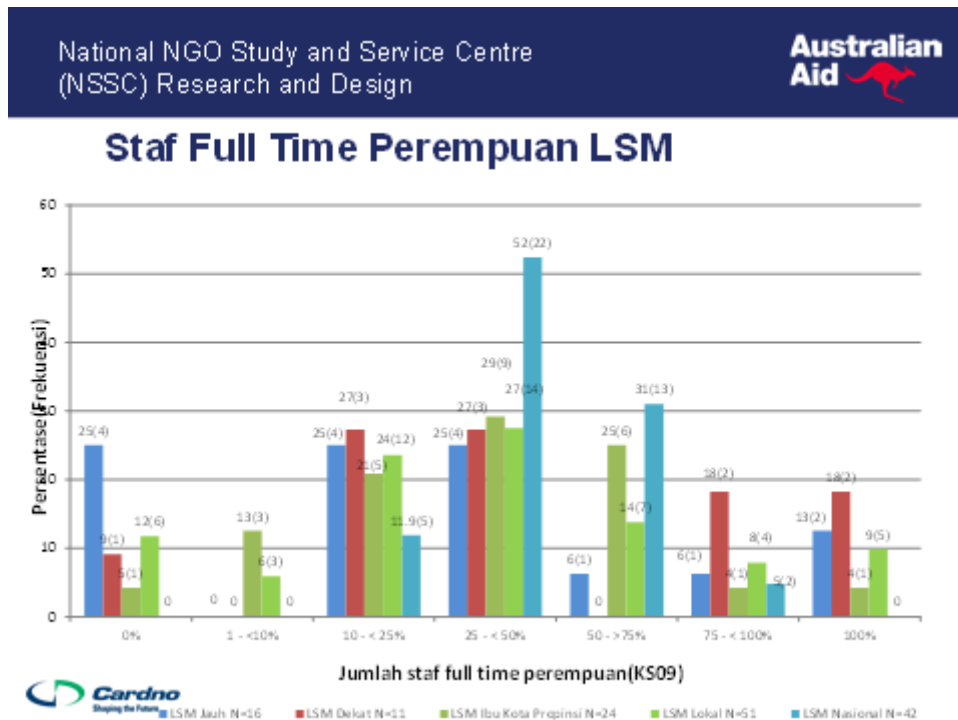
Slide 70



Slide 71



Slide 72



Slide 73

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



SDM – Kualitas

- Terkait kualitas staf, lebih banyak LSM nasional mengatakan bahwa mereka memiliki staf yang cukup terampil, namun tidak halnya untuk LSM "jauh"
- Ada sedikit perbedaan terkait kualitas staf antara LSM cabang dan non-cabang
- Ada cukup banyak LSM lokal yang stafnya bergelar sarjana. Di tingkat nasional lebih mungkin dibandingkan lokal untuk bergelar magister dan di atasnya.
 - 4/5 LSM nasional mengatakan hampir semua stafnya minimal bergelar sarjana dibandingkan dengan 1/3 LSM lokal
 - Setengah dari LSM nasional memiliki direktur bergelar sarjana, dan 1/3 memiliki gelar magister; 58% dari LSM lokal memiliki direktur bergelar sarjana, namun hanya 7% bergelar magister.

Kualitas SDM secara umum perlu lebih didalami, karena hasil dari survei kuantitatif menyebutkan bahwa tingkat kualitas SDM di lokal lebih tinggi. Namun dari sisi kualitatif belum begitu jelas mengenai apa yang menjadi tantangan dalam hal SDM. Karena dari apa yang didapat dari kuantitatif bahwa kualitas bukan hanya tentang tingkat pendidikan tapi juga soal skill.



This Australian aid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

7
3

Slide 74

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Kualitas staf: Staf memiliki cukup ketrampilan berdasarkan lokasi (hanya untuk LSM yang punya staf dibayar, MG00=1)

Sebagian besar staf memiliki cukup ketrampilan

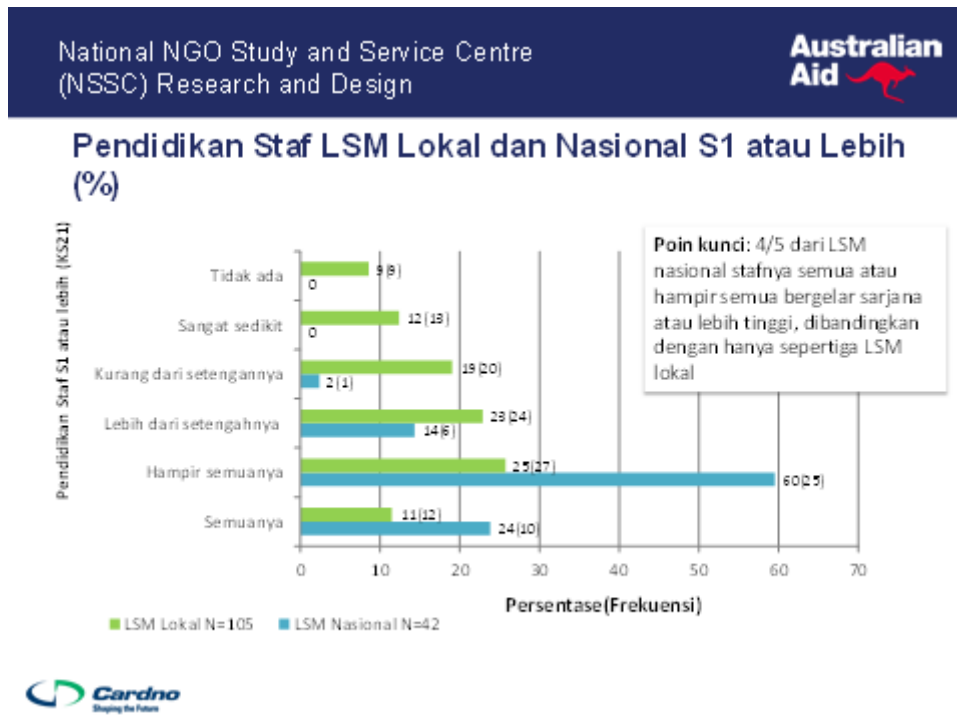
- LSM Lokal jauh: 57% dari Total N=21
- LSM Lokal dekat: 80% dari Total N=15
- LSM Ibu kota propinsi: 80% dari Total N=25
- LSM Lokal: 72% dari Total N= 61
- LSM Nasional: 87% dari Total N=30

Poin kunci: makin jauh LSM dari pusat kota, makin kecil kemungkinan *direktur atau staf senior* melaporkan bahwa lembaga mereka memiliki staf yang cukup terampil.

QS: MG05, pilih satu jawaban yang sesuai



Slide 75



Slide 76

National NGO Study and Service Centre (NSSC) Research and Design **Australian Aid**

Kualitas staff: Staf LSM lokal memiliki cukup ketrampilan berdasarkan cabang vs non cabang(hanya untuk LSM yang punya staf dibayar, MG00=1)

Kebanyakan LSM melaporkan bahwa staf mereka cukup terampil, dan hanya ada sedikit perbedaan antara LSM cabang dan non-cabang

Cabang: 78% (N= 18)

Non Cabang: 70% (N=43)

QS: MG05, pilih satu jawaban yang sesuai; VM01 jawaban Ya/Tidak

Cardno Shipping the Future

Slide 77

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



SDM – Pengembangan

- Sepertinya direktur lembaga yang paling sering mendapatkan pengembangan SDM pada LSM lokal 83% dari 105 lembaga (dibandingkan 50% di LSM nasional), dimana hanya 1/3 menyatakan bahwa 'staf yg ditunjuk/staf khusus melakukannya (dibandingkan 74% di tingkat nasional)
 - *Angka ini masih perlu dikontekstualisasikan terkait besaran staf (dan besaran anggaran)*
- 2/3 LSM lokal dan 4/5 LSM nasional melaporkan bahwa mereka memiliki rencana dan telah melakukan pembangunan kapasitas; jumlah yang sama juga memiliki staf yang dibayar
 - *Apa yang sudah secara riil dilakukan oleh LSM untuk peningkatan kapasitas staf? Data ini tidak sesuai dengan pengalaman praktis peserta lokakarya*



This AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

7

Slide 78

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



SDM – Peluang-peluang Kepemimpinan

- Semua dari 30 LSM nasional dan 88% dari LSM lokal, setuju atau sangat setuju bahwa lembaga mereka perlu memperluas peluang kepemimpinan bagi generasi muda
 - Sekitar 7% LSM lokal tidak setuju atau sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut
- Di saat yang sama, sekitar dua pertiga dari 42 LSM nasional yang disurvei melaporkan bahwa hanya direktur ataupun hanya direktur beserta 1-2 staf senior dapat menyetujui penggunaan uang di atas Rp 1 juta. Meskipun pernyataan ini perlu dicek silang dengan besaran anggaran lembaga dan jumlah total staf, hal ini dapat berarti bahwa keputusan di lembaga sangat tersentralisasi
 - Untuk ¼ LSM nasional, Rp 1 juta biasanya merupakan 0,07% atau kurang anggaran tahunan mereka
 - Tren yang sama juga terdapat di sekitar 80% LSM lokal yang disurvei (semua jenis, jauh, dekat, propinsi); namun dengan jumlah staf dan besaran anggaran yang lebih kecil, sangat sulit untuk membuat kesimpulan, sehingga data perlu dicek silang.
- *Data mengenai mempercayai staf dan persepsi akan kualitas staf juga perlu ditelaah lebih jauh (kesan pertama= umumnya tingkat kepercayaan terhadap staf rendah, khususnya di LSM lokal)*



This AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

8

Slide 79

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



SDM – Pergantian staf

- 1/5 LSM lokal melaporkan bahwa pergantian staf *seringkali* merupakan masalah (menurut laporan oleh direktur). Tidak ada variasi di antara LSM cabang dan non-cabang
 - Dibandingkan dengan 3% LSM nasional (1 LSM)
 - *Perlu diklarifikasi lebih jauh dengan riset kuat.tatf*
 - **Hanun demikian, setengah dari masing-masing LSM lokal dan nasional melaporkan bahwa mereka setuju atau sangat setuju bahwa pergantian staf perlu dikurangi**
- 1/3 dari masing-masing 58 LSM lokal dan 42 LSM nasional mempunyai staf yang pindah ke pihak swasta dalam 3 tahun terakhir (sebagian besar dari LSM cabang, dan/atau LSM yang dekat atau berada di ibukota propinsi, dibandingkan dengan LSM jauh). 17% pindah ke LSM lokal/nasional (lebih banyak berasal dari LSM non-cabang dan yang berada di propinsi). Ada 2 poin yang menarik:
 - 12% memiliki staf yang meninggalkan lembaga untuk menjadi anggota dewan (sebagian besar dari LSM non-cabang)
 - *Dari pada jumlah staf yang meninggalkan lembaga ke sektor apa saja perlu dikontekstualisasikan menurut jumlah staf total*



This Australian aid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

7
9

Slide 80

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Keluarnya staf: LSM Perlu mengurangi

% setuju + % sangat setuju perlu mengurangi:

- LSM lokal Jauh : 38 % (N= 34)
- LSM Lokal Dekat: 64 % (N= 39)
- LSM Ibu Kota Propinsi :52% (N= 25)
- LSM Lokal: 49 % (N=98)
- LSM Nasional: 47 % (N=30)

Berdasarkan cabang/non cabang:

Cabang : 57% (N=30)

Non cabang : 50% (N=68)

QS: PK08 , pilih salah satu jawaban yang sesuai; VM01 jawaban Ya/Tidak



Slide 81

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Rata-rata jumlah staf LSM Lokal dan nasional ada Staf keluar

	LSM lokal		LSM Nasional	
	Rata-rata	N	Rata-rata	N
Sektor swasta	4	17	4	13
Anggota Dewan	2	7	1	8
Lembaga donor	2	3	3	15
LSM lokal/nasional lainnya	2	10	3	19
LSM Internasional	2	4	2	14

QS: KS23, KS24, KS25, KS26, KS27, menyebutkan jumlah staf yang keluar untuk bekerja di masing-masing tempat tersebut



Slide 82

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Lanjutan...

- *Data mengenai insentif finansial dibandingkan non-finansial perlu ditelaah lebih lanjut (khususnya ditambah dengan riset kualitatif), dan juga perlu mengekstrapolasi temuan-temuan kualitatif dan kuantitatif.*
 - *Perlu dilihat laporan penelitian kualitatif (yang membahas lebih dalam data dari FGD dengan staf mengenai SDM)*



This AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

12/8

Slide 83

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



SDM - Regenerasi

- *Perdebatan mengenai apa itu regenerasi – apa yang dimaksud, apa saja standar-standarnya, apakah berfokus pada regenerasi di tingkat lembaga atau sektor (atau keduanya), dan apakah regenerasi staf atau hanya kepemimpinan?*
- Setengah dari LSM lokal (lebih banyak LSM propinsi) dan LSM nasional mengatakan bahwa mereka memiliki rencana regenerasi yang jelas dan melaksanakan strategi regenerasi tersebut (*Menurut responden survei yang kebanyakan adalah pemimpin senior lembaga*)
 - **Namun, hampir 2/3 lembaga cabang mengatakan hal yang sama, dibandingkan 40% lembaga non-cabang**
- Ketika regenerasi terjadi, nampaknya paling efektif pada lembaga yang mapan.
 - Jenis lembaga menentukan (contohnya yayasan, perkumpulan), namun faktor utama adalah peranan aktivis senior
 - Jika regenerasi terjadi, memiliki basis kelembagaan (contohnya peraturan)
(*Catatan: Hasil penelitian kualitatif lebih lanjut membahas mengenai hubungan dengan universitas, lihat juga pendekatan LBH*)



THIS AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

8
3

Slide 84

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Regenerasi 2x2

	+	-
+	++ Regenerasi horizontal <u>dan</u> vertikal terjadi	+- Hanya regenerasi horizontal yang terjadi
-	+- Hanya regenerasi vertikal yang terjadi	-- Baik regenerasi horizontal maupun vertikal tidak terjadi



Slide 85

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Lanjutan ...

- Hal-hal yang mempengaruhi regenerasi memiliki dimensi horizontal maupun vertikal, sehingga penguatan sektoral mungkin membutuhkan kombinasi keduanya (2 x 2)
 - Jaringan pelindung membentuk akses
 - Beberapa bentuk regenerasi juga terbentuk lewat kekeluargaan
(catatan: hasil temuan kualitatif membahas topik ini lebih lanjut)
- *Data survei perlu dianalisa terkait lamanya direktur dan wakil direktur berada dalam posisinya, dibandingkan umur lembaga. Kaitannya dengan umur staf juga perlu diteliti lebih lanjut*



This AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

85

Slide 86

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



TOPIK TAMBAHAN UNTUK PENELITIAN LANJUTAN



This AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

86

Slide 87

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



SDM - Regenerasi

Hal-hal yang mungkin perlu diteliti lebih jauh:

- Perubahan ideal/idealism berdampak pada keinginan staf untuk bergabung dan tinggal dalam sektor?
- Ada isu kesukarelaan, gaji, dan komitmen
- *Lihat data "faktor-faktor eksternal"; data lainnya-*
- Contohnya: Apa dampak dari persepsi publik tentang kerja di LSM, jika ada?
- *Isu generasi dan perbedaan persepsi – staf muda dan pemimpin?*
- *Dampak parpol dalam merekrut staf LSM?*



This AustralianAid project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and managed by Cardno.

8
7

Slide 88

National NGO Study and Service Centre
(NSSC) Research and Design



Topik-topik Lainnya

- Inklusivitas dan gender dan pengaruhnya pada kepemimpinan, kemajuan organisasi, dan tingkat kepercayaan/akuntabilitas
- Kontribusi/peran LSM nasional dan LSM lokal/berbasis isu (digabungkan dengan poin-poin terkait)
- Dampak, persepsi dan cara-cara untuk mengubah perilaku publik
 - Dampak dari pendekatan/persepsi donor
 - Bagaimana keputusan program dibuat di dalam badan kepengurusan LSM
 - Jenis kebutuhan peningkatan kapasitas bagi LSM
 - Pendanaan swadaya
- Peran pemerintah atau sektor lainnya dalam menjembatani pendanaan, atau CSR dari sektor swasta untuk masyarakat melalui LSM (dan digabung dengan peran kebijakan)
- Hubungan/peran dari DPR dengan LSM
- Jaringan dan koalisi internasional

